

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU PRAKERJA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS KABUPATEN GAYO LUES)**



Disusun Oleh:

**JULESTI
NIM. 190602135**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julesti
NIM : 190602135
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengembangkan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2024
Yang Menyatakan,



Julesti

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


**Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues)**

Disusun Oleh:


Julesti
NIM: 190602135


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,


Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001


Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,
AR - RANIRY

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues)

Julesti
NIM: 190602135

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

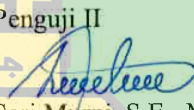
Sekretaris,


Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Penguji I


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Penguji II


Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Julesti
NIM : 190602135
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 190602135@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues)

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Februari 2024

Mengetahui

AR - RANIRY

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Julesti
NIM. 190602135

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kasus Kabupaten Gayo Lues)**. Serta shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan nabi besar muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Penulis menyadari banyak kesilapan dan kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hafas Furgani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua Dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.Hi., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Pembimbing I dan Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Penguji I dan Seri Murni, S.E., M.Si., Ak. selaku Penguji II yang telah membantu penulis dalam penilaian serta perbaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik (PA) Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak. Serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Seluruh pihak yang bersedia menjadi narasumber dan telah banyak membantu peneliti dalam mendapatkan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan cinta dan kasih sayang dan menjadi support system bagi peneliti. Kepada bapak Mattawar dan Ibu Jumiah yang telah mengisi dunia dengan kebahagiaan yang tiada habisnya .Atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan agar

peneliti dapat mengejar segala impian. Terimakasih atas segala jasa yang tidak akan pernah bisa terbalaskan. Kepada saudara tercinta Khairul Abdi dan Aidil Fiqri terimakasih kepada abang dan adik yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta sedikit bullyan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini.

9. Kepada best friends Silvie Aulia Rahmah, Ifa Humairah, Rizma Salsabillah, Nur Hikmah, Nadia Riska, Fitri Mala Mulya, Ika Hanifa dan kak Maulidar. Terimakasih kepada kalian semua yang selalu menjadi teman terbaik bagi penulis dalam setiap keadaan baik suka maupun duka dan turut membantu serta memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada teman seperjuangan khususnya Ekonomi syariah leting 2019 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kalian semua. Semoga bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan

perbaikannya sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 10 Februari 2024

Penulis,

Julesti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ظ	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	س	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Julesti
NIM : 190602135
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues)
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
Pembimbing II : Intan Quratulaini, S.Ag., M.Si

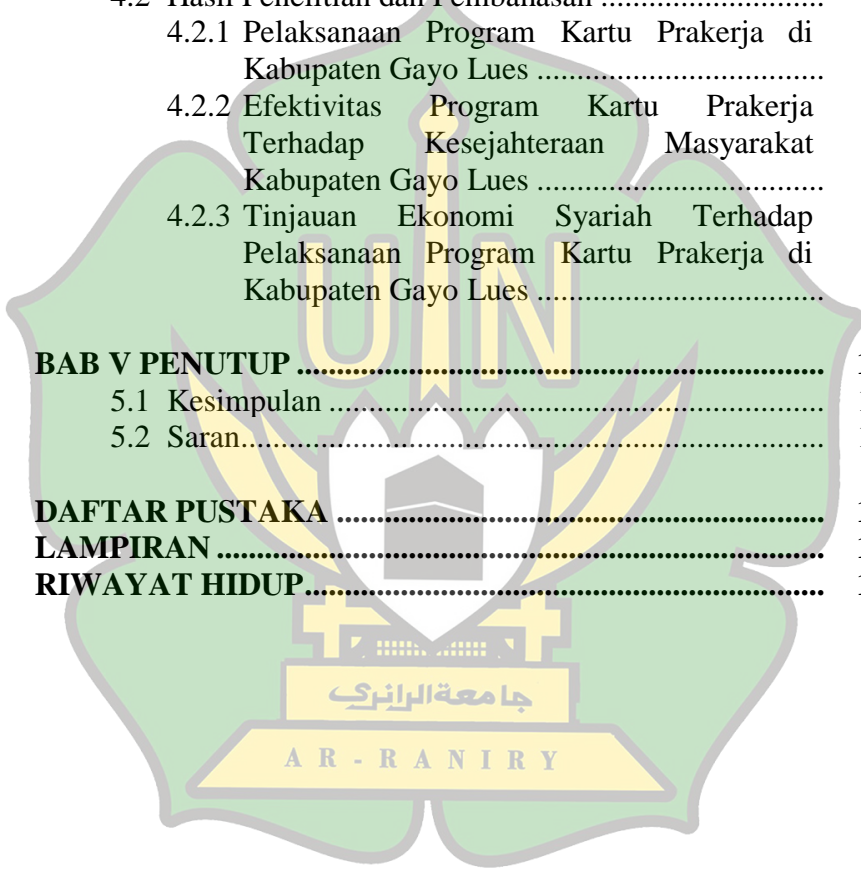
Penelitian ini dilakukan di kabupaten Gayo Lues yang merupakan daerah dataran tinggi di provinsi Aceh dengan mata pencaharian terbesar terletak pada sektor pertanian. Kehidupan masyarakat kabupaten Gayo Lues tergolong menengah kebawah sehingga banyak diantaranya berada pada garis kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program kartu prakerja dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Meskipun terdapat beberapa dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat dan kesuksesan individu dalam mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Adapun dalam perspektif ekonomi syariah program ini sangat sesuai dan sangat tepat untuk terus dilanjutkan sebagai salah satu cara dalam memotivasi masyarakat yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan untuk menjadi lebih baik.

Kata kunci: Efektivitas, Program kartu prakerja, Kesejahteraan masyarakat

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Konsep Efektivitas	11
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	11
2.1.2 Indikator Efektivitas	15
2.2 Program Kartu Prakerja	21
2.3 Konsep Kesejahteraan.....	36
2.3.1 Indikator Kesejahteraan.....	36
2.3.2 Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah	47
2.4 Penelitian Terdahulu	54
2.5 Kerangka Berpikir.....	60
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	62
3.1 Jenis Penelitian.....	62
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	63
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	64
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	65

3.5 Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Profil Lokasi Penelitian.....	70
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
4.1.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian	73
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	74
4.2.1 Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues	74
4.2.2 Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues	78
4.2.3 Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues	86
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110
RIWAYAT HIDUP.....	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Indonesia.....	2
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	57
Tabel 4.1 Data Penduduk Kabupaten Gayo Lues.....	71
Tabel 4.2 Subjek Penelitian.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	110
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara.....	112
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	129
Lampiran 4 Biodata Penulis	132



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat suatu daerah merupakan suatu permasalahan yang menjadi perhatian semua orang. Kesejahteraan merupakan tatanan kehidupan sosial, material, dan spiritual yang disertai rasa aman, kesusilaan, dan kedamaian pribadi. Setiap warga negara dapat berupaya memenuhi kebutuhan materi, spiritual, dan sosial dirinya, keluarga, dan masyarakat semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila seluruh kebutuhannya terpenuhi. Kesejahteraan ini dapat diukur dari kesehatan masyarakat, status ekonomi, kebahagiaan, pendidikan dan kualitas hidup.

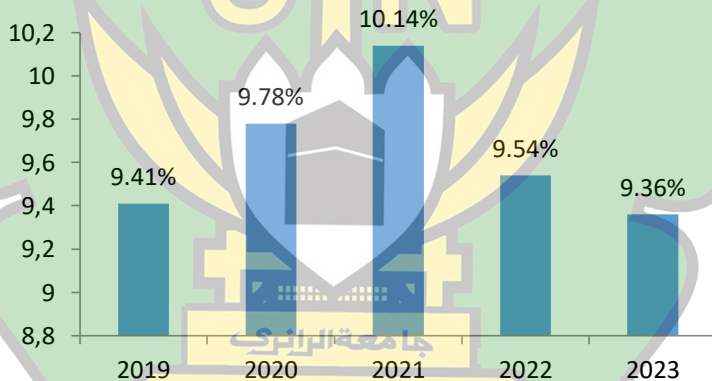
Islam memandang kesejahteraan sebagai suatu perwujudan kepentingan atau kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri adalah untuk menegakkan tujuan syariah. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin kecuali kesejahteraan sejati bagi seluruh umat manusia di dunia dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material. (Rohman, 2010).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesejahteraan tidak tercipta dalam lingkungan masyarakat salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah rendahnya taraf hidup, yaitu derajat kekurangan materi suatu orang atau sekelompok orang

dibandingkan dengan taraf hidup yang berlaku umum pada masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang serius bagi masyarakat Indonesia, dan masih banyak masyarakat yang masuk dalam golongan miskin. Berikut persentase kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir:

Gambar 1.1
Persentase Kemiskinan Indonesia

Persentase Kemiskinan Indonesia
(Data per bulan Maret)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, persentase kemiskinan dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2019 kemiskinan tercatat sebesar 9,41 %, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 9,78 %. Pada tahun 2021 kemiskinan mencapai angka tertinggi pada 5 tahun terakhir sebesar 10,14%. Namun pada tahun 2022-2023 angka

kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, tahun 2022 kemiskinan turun menjadi 9,54 %, tahun 2023 kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 9,36% (BPS, 2023).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan masyarakat Indonesia tidak dapat mencapai kesejahteraan secara utuh, terutama masyarakat yang tergolong menengah kebawah. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan menciptakan program kartu prakerja. Program Kartu Prakerjadiatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 atas perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Program kartu prakerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam masalah perekonomian. Dalam Islam, perekonomian diatur dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Sebab ilmu ekonomi (muamalah) menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Kewajiban setiap muslim adalah menerapkan semua (aturan) Syariah dengan kemampuan terbaiknya dalam semua aspek kehidupan, termasuk mata pencaharian ekonomi. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk saling membantu. Konsep Islam yang harus diterapkan dalam bidang ini tidak lepas dari ilmu-ilmu sosial yaitu hukum Islam dan ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, prinsip keadilan harus diterapkan untuk

membangun kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tugas pemerintah secara nasional (Padilla, 2022).

Program kartu prakerja berbentuk pelatihan dan pemberian insentif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja sesuai dengan bidang yang diinginkan dan mulai diperkenalkan oleh presiden Jokowi pada kampanyenya ditahun 2019 serta terealisasi pada tahun 2020. Program Kartu Prakerja dinilai cocok untuk mengatasi masalah terkait jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Untuk bergabung menjadi penerima cukup dilakukan dengan online, yaitu dengan mengakses website resmi akun prakerja (Prakerja, 2020).

Program Kartu Prakerja diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia termasuk provinsi Aceh yang mengundang antusiasme tinggi dari masyarakat Aceh, dibuktikan dengan jumlah penerima program di bulan Mei 2020 sebesar 12.526 orang mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada bulan September menjadi 122.319 orang. Data dari Sekretariat Kementerian Koordinator (Sesmenko) perekonomian Indonesia menyatakan bahwa penerima program tertinggi pada tahun 2020 yaitu berada di kabupaten Bireuen dengan total 20.958 orang, dan penerima terendah berada di kabupaten Gayo Lues dengan jumlah 580 orang. Begitu juga pada tahun 2021 kabupaten Gayo Lues masih berada pada urutan keempat dengan penerima program terendah yaitu sebanyak 1.452

orang. Sementara penerima pada tahun 2022 sebanyak 2.668 orang. (Sesmenko, 2022).

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Program Kartu Prakerja

Tahun	Provinsi Aceh	Kabupaten Gayo Lues
2020	122.319	580 orang
2021	135.707	1.452 orang
2022	185.466	2.668 orang

Sumber: Sesmenko, 2022

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Gayo Lues yang merupakan daerah dataran tinggi di provinsi Aceh dengan mata pencaharian terbesar terletak pada sektor pertanian. Komoditas unggulan daerah tersebut berupa kopi, kakao, cabai, sere wangi, padi, dan lain sebagainya. Selain pertanian, mata pencaharian lainnya berada pada peternakan, UMKM, dan Wiraswasta. Kehidupan masyarakat tergolong menengah ke bawah sehingga banyak diantaranya berada pada garis kemiskinan. Hal ini menyebabkan bidang perekonomian, pendidikan, serta kesehatan berada di bawah standar kehidupan. Maka dari itu dengan adanya program kartu prakerja ini diharapkan dapat menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya penerima program kartu prakerja di kabupaten Gayo Lues bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses program ini karena dilakukan secara online mengingat tidak semua

masyarakat paham dalam menggunakan internet, serta tidak semua masyarakat memiliki handphone untuk bisa mendaftarkan diri sebagai penerima program kartu prakerja. Faktor lain yang menjadi penghambat terrealisasinya program ini secara merata di seluruh lapisan masyarakat adalah adanya beberapa desa yang hingga saat ini belum memiliki akses internet. Ketiga faktor tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga yang menerima program hanya sebanyak 580 orang (Wawancara, 10 Juni 2023).

Program kartu prakerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada realitanya hal tersebut tidak terjadi. Fakta dilapangan khususnya di kabupaten Gayo Lues berdasarkan wawancara dengan ibu Lelawati selaku penerima program kartu prakerja maka dapat diperoleh informasi bahwa insentif yang diberikan pasca pelatihan sebagian besar digunakan oleh masyarakat penerima program sebagai kebutuhan konsumtif, hal ini terjadi karena tidak semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhan primer, sementara pelatihan yang diberikan tidak dijalankan dengan serius oleh penerima program. Selain itu banyak juga yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendaftarkan diri sebagai penerima program yang akan dibayar sesuai dengan kesepakatan. Sementara pelatihan yang ada pada program ini dilakukan oleh pihak ketiga tersebut, itu artinya penerima program hanya memanfaatkan insentifnya saja tanpa menjalani pelatihan.

Hal ini tentunya menjauhkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui program tersebut (Wawancara, 10 Juni 2023).

Program kartu prakerja sangat dibutuhkan di provinsi Aceh terutama di kabupaten Gayo Lues agar dapat bermanfaat untuk membantu perekonomian masyarakat, meningkatkan potensi kerja, meningkatkan produktifitas serta daya saing angatan kerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas efektivitas program kartu prakerja terhadap kesejahteraan masyarakat dan tinjauan ekonomi syariah terhadap program tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah terkait **“Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kabupaten Gayo Lues)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues?
2. Apakah Program Kartu Prakerja efektif dalam menyejahterakan masyarakat Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan program kartu prakerja di kabupaten Gayo Lues.
2. Mengetahuiefektivitas Program Kartu Prakerjadalam menyejahterakan masyarakat kabupaten GayoLues.
3. Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Program Kartu Prakerjadi kabupaten Gayo Lues?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bernilaiilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, bisa menjadi bahan refrensi selanjutnya khususnya terkait dengan Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan berguna sebagai bahan untuk kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Peneltian ini di harapkan dapat dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan di harapkan dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Bagi pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi bahwasanya Program Kartu Prakerja dapat membantu mengurangi beban masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu rangkaian penyajian dari masing-masing bab secara singkat dan jelas. Sistematika penulisan ini bermanfaat sebagai gambaran dari isi skripsi secara beraturan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kerangka penelitian dan landasan teori serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

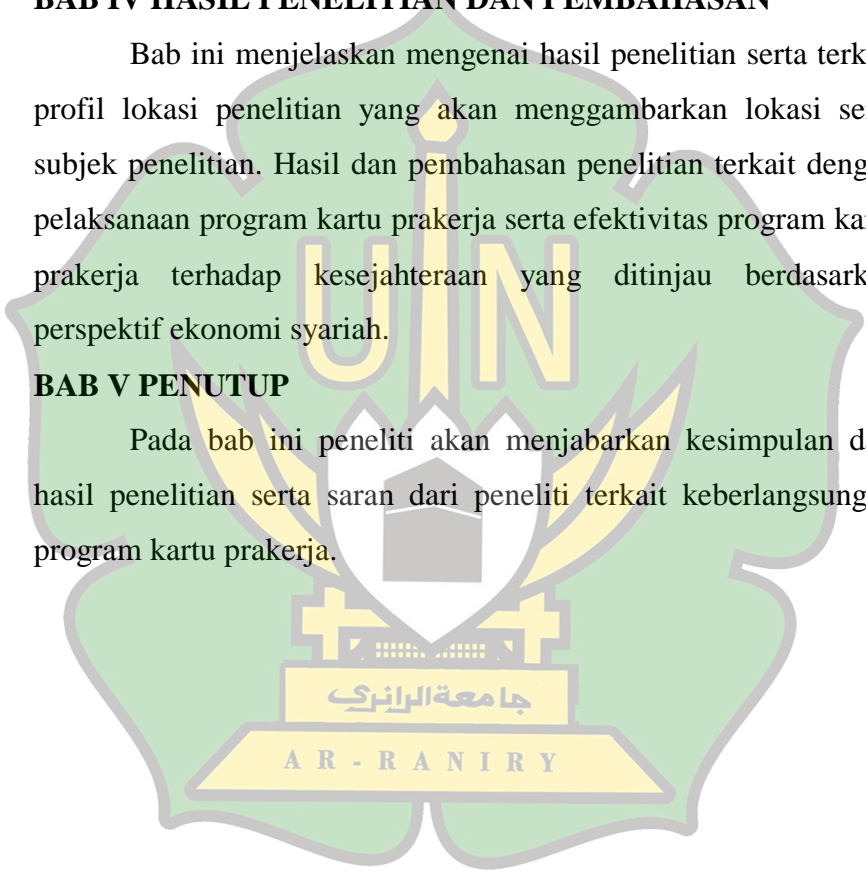
Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian serta terkait profil lokasi penelitian yang akan menggambarkan lokasi serta subjek penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian terkait dengan pelaksanaan program kartu prakerja serta efektivitas program kartu prakerja terhadap kesejahteraan yang ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti terkait keberlangsungan program kartu prakerja.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang telah dilakukan memperoleh hasil yang baik. Efektivitas merupakan daya guna, dalam suatu kegiatan terdapat kesesuaian pelaksanaan tugas dengan sesuatu yang ingin dituju. Efektivitas berasal mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Siregar, 2018).

Menurut makmur dalam buku yang berjudul efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan menyatakah bahwa efektivitas pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan beberapa hal, antara lain adalah (Amsyal et al., 2021):

1. Ketepatan penentuan waktu, waktu yang digunakan dengan tepat dapat mempengaruhi efektivitas suatu program dalam mencapai tujuan.

2. Ketepatan penghitungan biaya, hal tersebut digunakan agar saat program sedang berjalan tidak terjadi kekurangan dana atau anggaran sampai program tersebut selesai.
3. Ketepatan dalam pengukuran, dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi, ketepatan standar yang digunakan merupakan suatu ukuran dalam keefektivitasan program.
4. Ketepatan dalam penentuan pilihan, kegiatan ini dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu efektivitas.
5. Ketepatan berpikir dalam menentukan efektivitas untuk pencapaian tujuan yang di inginkan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, perintah yang diberikan harus jelas dan mudah dipahami yang bertujuan agar pelaksanaan perintah tersebut dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh efektivitas.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang tepat dapat menunjang efektivitas program.
8. Ketepatan sasaran, dapat menentukan keberhasilan Individu dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas merupakan suatu pengukur yang dapat menentukan sejauh mana jangkauan sasaran yang telah diraih yang akan menjadi penentu apakah kegiatan yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Hal ini juga tentunya akan mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan kedepannya. Efektivitas memiliki kaitan dengan tingkat keberhasilan operasi pada sektor public,

sehingga suatu kegiatan dianggap efektif apabila memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan layanan masyarakat yaitu tujuan yang ingin dicapai (Ahmad, 2019).

Efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas adalah sebuah konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Artinya efektivitas tidak hanya dipandang berdasarkan sisi produktivitas saja, melainkan juga berdasarkan sisi persepsi ataupun sikap seseorang. Efektivitas adalah pencapaian tujuan pada suatu organisasi dengan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia dengan efisien yang ditinjau berdasarkan sisi input (masukan), output (keluaran), dan proses. Sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana, anggota kelompok, dan model serta metode yang digunakan. Pengertian efektivitas berdasarkan hal tersebut adalah keadaan yang menggambarkan seberapa besar pencapaian rencana atau tingkat keberhasilan melalui usaha berdasarkan kesesuaian tujuan dari rencana tersebut. Serta efektivitas berdasarkan kaitan antara pencapaian hasil sesuai dengan tujuan awal dan rencana yang telah dibuat (Rosadi, 2021).

Ukuran yang menentukan seberapa jauh keberhasilan pencapaian target merupakan suatu efektivitas, sesuatu dapat dikategorikan efektif apabila pencapaian sesuai dengan yang

menjadi kehendak sebelumnya. Kegiatan atau usaha tergolong efektif apabila kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan. Jika tujuan yang dimaksud adalah tujuan intansi maka dapat dinyatakan bahwa proses dalam mencapai tujuan tersebut merupakan suatu keberhasilan dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsi dalam instansi tersebut. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan upaya melakukan perbandingan antara rencana awal yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah terwujud. Jika hasil yang diperoleh tidak tepat dengan rencana awal yang menyebabkan tujuan tidak tercapai maka dapat dikatakan kegiatan tersebut tidak efektif (Abizal, 2022).

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efesiensi serta kebaikan kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemajuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Target tersebut sangat penting pada setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, maka efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu

memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan (Rahman, 2021).

Unsur yang penting dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang di harapkan. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya (Rahman, 2021).

2.1.2 Indikator Efektivitas

Efektivitas memberikan petunjuk terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran yang tepat yang sebelumnya telah ditentukan. Untuk menentukan efektivitas sendiri dapat dilakukan dengan memberikan perbandingan antara rencana awal yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah terwujud. Dalam artian lain berarti membandingkan antara ekspektasi awal terbentuknya program dengan realita yang terjadi setelah program tersebut berlangsung. Bila program atau kegiatan yang telah

berjalan tidak sesuai dengan sasaran awal sehingga tujuan dari adanya program tersebut tidak tercapai, maka dapat dipastikan program tersebut tidak efektif. Richard M. Steers (2010) mengemukakan teori bahwa untuk mengukur efektivitas terdapat tiga indikator, antara lain yaitu :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan dari upaya untuk mencapai suatu tujuan harus dipandang sebagai satu proses. Adapun beberapa faktor yang menentukan pencapaian dari sebuah tujuan program antara lain adalah kurun waktu dan sasaran yang menjadi target konkrit. Agar dapat melihat keberhasilan sebuah program maka dapat ditentukan dari sejauh mana program tersebut telah mencapai tujuannya. Tujuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah mencapai kesejahteraan dari terlaksananya Program Kartu Prakerja.

2. Integrasi

Integrasi merupakan proses untuk mengukur tingkat kemampuan organisasi untuk menerapkan sosialisasi dan komunikasi. Sosialisasi program pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi baik itu program, kebijakan, ataupun peraturan dari pihak pembuat atau pemilik program, kebijakan, dan peraturan kepada pihak-pihak lain yang menjadi pelaksana maupun yang menjadi sasaran dari program tersebut. Isi informasi yang disebarluaskan

bermacam-macam tergantung pada tujuan program. Maka integrasi yang dimaksud dalam program ini adalah sosialisasi yang dilakukan mengenai tata cara pendaftaran pada Program Kartu Prakerja.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu proses untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu program yang dijalankan harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di lapangan. Program kartu prakerja harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan menjadi sasaran dari program tersebut.

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Namun selain cara diatas, ada cara lain yang dinilai lebih tepat untuk mengukur efektivitas pada suatu program menurut teori dari Campbell, yaitu dengan mempertimbangkan aspek-aspek di bawah ini :

1. Keberhasilan suatu program

Efektivitas keberhasilan program dapat dilakukan dengan cara melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat dan disetujui oleh pihak-

pihak yang terkait pada awal sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses program dan mekanisme saat beradadilapangan mulai dari masyarakat sampai lingkungannya yang harus diperhatikan.

2. Ketepatan sasaran program

Efektivitas ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam menjalankan yang terdapat aspek output. Artinya, efektivitas dapat diukur dari tingkat output dari sebuah program yang dijalankan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu pada implementasi sasaran pembuatan kebijakan harus dianalisis dengan cermat dan baik agar nantinya program sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

3. Kepuasan program

Kepuasan merupakan salah satu indikator efektivitas yang mengacu pada sebuah keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan konsumen atau pengguna. Kepuasan ini menjadi pengaruh besar terhadap berjalannya suatu kebijakan karena apabila program tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat maka akan timbul reaksi yang tidak diinginkan.

4. Tingkat input dan output

Efektivitas tingkat input dan output sangat berpengaruh karena jika output lebih besar dari pada input maka bisa dibilang efisien dan sebaliknya bila input lebih

besar dari pada output maka dapat dibilang tidak efisien. Dalam artiannya input dan output ini menjadi pengaruh besar untuk bisa melihat efektivitas suatu program.

5. Tercapainya tujuan secara menyeluruh

Dalam hal ini dapat dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan menyeluruh merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Menurut Fasri et al., (2023) efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi terkait. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output. Menurut Kettner terdapat kriteria penilaian apakah suatu program efektif atau tidak, yaitu:

1. Effort (Upaya), data memberikan umpan balik pada sejumlah produk dan pelayanan yang disediakan, kualitas jumlah produk dan pelayanan yang disediakan, dan tercapainya penyelesaian jumlah pelayanan.

2. Cost – Efficiency, data memberikan umpan balik mengenai biaya penyediaan produk program dan layanan, termasuk output menengah, kualitas output, dan output akhir.
3. Result, data memberikan umpan balik tentang sejauh mana suatu program dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan (outcome) baik hasil sementara dan hasil akhir. Result data dapat dipantau selama pelaksanaan untuk membandingkan hasil aktual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan.
4. Cost – Effectiveness data memberikan umpan balik pada biaya mencapai hasil program (outcome), baik hasil sementara dan hasil akhir. Cost Effectiveness data biasanya hanya tersedia pada akhir tahun program (evaluasi program) dan digunakan untuk mendokumentasikan biaya mencapai hasil (outcome) untuk keperluan perencanaan kebijakan dan untuk tujuan pelaporan pengukuran kinerja.
5. Impact (Dampak), data memberikan umpan balik pada pertanyaan penilaian yang paling sulit dari semua yaitu: apa yang terjadi dengan klien sebagai hasil dari partisipasi dalam program dan apa yang tidak akan terjadi jika tidak adanya program? Untuk menjawab pertanyaan ini, data dampak biasanya dihasilkan dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial, termasuk penciptaan kelompok kontrol untuk tujuan perbandingan dan penggunaan statistik untuk mengukur besarnya dampak.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, maka dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas program kartu prakerja maka dipakai teori dari Richard M. Sterss, yaitu diukur berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

2.2 Program Kartu Prakerja

Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari usaha yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Suatu program yang baik harus memiliki keterkaitan antara tujuan program dengan sasaran, masuk akal dan bisa dicapai (Ekasari, 2020).

Kartu prakerja merupakan salah satu program dari pemerintah yang digalangkan oleh presiden Jokowi yang bertujuan membina masyarakat Indonesia agar memiliki keterampilan kerja. Program ini memberikan pelatihan kerja serta bantuan insentif dengan mengoptimalkan tempat pelatihan baik yang berada dibawah kementerian maupun tempat pelatihan swasta. Prakerja berasal dari dua kata yaitu pra yang memiliki arti sebelum dan kerja yaitu kegiatan untuk melakukan sesuatu, bila digabung maka memiliki pengertian kegiatan guna mencari nafkah (Consuello, 2020).

Kartu Prakerja sejatinya adalah menjadi jembatan yang mampu untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai macam pelatihan keterampilan baru. Selain itu, pemerintah juga

mengharapkan terciptanya masyarakat yang lebih mampu dan berdaya untuk sekaligus mengurangi ketergantungan berlebih kepada orang lain. Fasilitas akses berbagai macam video tutorial pelatihan, serta bentuk bantuan dana tunai yang diberikan oleh program Kartu Prakerja. Program kartu prakerja diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat meningkat pendapatan karena semakin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sebaliknya. Program kartu prakerja sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional masyarakat pada usia produktif, agar masyarakat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dibidangnya. Oleh sebab itu pemerintah menggunakan beberapa platform pembelajaran online agar menyediakan kelas kelas online yang dapat digunakan masyarakat. Manfaat dari pelatihan *skill* yang diberikan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta *skill* dalam bidang yang diinginkan oleh para penerima prakerja. (Sudiana, 2022).

Menurut Perpres (2020) Kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan dilansir dari prakerja.go.id, kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan. Jadi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kartu prakerja merupakan suatu identitas yang diberikan kepada seorang yang telah resmi terdaftar sebagai calon

peserta Program Kartu Prakerja yang di buat oleh pemerintah. Guna untuk masyarakat yang ingin meningkatkan keahliannya dengan mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh kementerian ketenagakerjaan. Adapun sasaran program kartu prakerja adalah sebagai berikut:

1. Pencari kerja berusia minimal 18 tahun
2. Pekerja/buruh yang terkena PHK karena pandemi
3. Pekerja bukan penerima upah seperti pelaku usaha mikro dan kecil
4. Tidak sedang berada dalam pendidikan formal.

Menurut Website Prakerja (2020), Program Kartu Prakerja merupakan program untuk mengembangkan kompetensi kerja serta kewirausahaan yang diperuntukan kepada pencari kerja, buruh/pekerja yang terkena PHK, serata pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi kerjanya termasuk pelaku UMKM. Program Kartu Prakerja ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 atas perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui Program Kartu Prakerja. Program ini dijalankan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana didalamnya terdapat pernyataan bahwa presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintah sesuai dengan UUD.

Tujuan utama dari terciptanya program kartu prakerja adalah sebagai wadah pengembangan kompetensi, peningkatan

produktifitas, serta pengembangan kegiatan kewirausahaan dengan mengikuti bermacam pelatihan agar dapat meningkatkan peluang karir dan mandiri sehingga diprioritaskan di dunia kerja. Masyarakat yang telah terlatih pada umumnya lebih memiliki kemampuan dalam menunjukkan produktifitas yang lebih besar, berarti mampu melakukan perubahan sikap, perilaku, pengetahuan serta keahlian yang lebih spesifik. Program pelatihan ini diharapkan dapat membantu dalam mempersingkat waktu dalam belajar sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Sertifikasi pelatihan yang diperoleh dari lembaga terpercaya dapat meningkatkan nilai masyarakat (Putra, 2020).

Program Kartu Prakerja ini memiliki banyak fitur digital yang membantu peserta penerima bantuan tersebut meningkatkan kompetensi dan daya saing dalam bekerja. Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif dana berupa uang bagi peserta yang telah melalui berbagai pelatihan dan pembinaan secara daring (virtual). Insentif dana yang diberikan tersebut diharapkan dapat dipergunakan bagi peserta untuk dibelanjakan agar roda perekonomian bisa berjalan dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat walaupun di tengah pandemi. Jaminan kesejahteraan sosial dalam Program Kartu Prakerja telah membantu masyarakat terkhusus untuk para pekerja yang tidak bekerja. Walaupun dampak yang ditimbulkan belum begitu progresif untuk masyarakat, namun pemerintah berupaya agar

kebijakan dalam Program Kartu Prakerja bisa membantu dan mengurangi beban pada masyarakat (Putra, 2021).

Hadirnya kartu prakerja sebagai solusi atas semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dan mengatasi masalah terkait ketenagakerjaan, adapun solusi yang diberikan adalah sebagai berikut (Hamzah, 2021) :

1. Memberikan keringanan atas biaya pelatihan oleh pekerja dan perusahaan
2. Membantu pengurangan biaya dalam mencari informasi pelatihan
3. Mendorong untuk bekerja
4. Menjadi tambahan dari pendidikan formal
5. Membantu peningkatan daya beli masyarakat terdampak pandemic Covid-19.

Program kartu prakerja merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta sehingga dapat memberikan manfaat kepada penerima program dan juga sektor swasta yang menyediakan pelatihan. Ada banyak platform digital yang turut meyertai pelayanan serta proses dalam keberlangsungan program antara lain yaitu Skill Academy, Kemnaker, Bukalapak, TokoPedia, Pijar, Sekolah.mu, Maubelajarapa, dan Pintaria. Dengan bergabung pada program, selanjutnya penerima program kartu prakerja akan memperoleh insentif sebesar Rp. 3.550.000, yaitu dengan biaya pelatihan sebesar Rp. 1.000.000 sebanyak 3 kali kursus, kemudian insentif sebesar Rp. 2.400.000 yang akan

diberikan Rp. 600.000 setiap bulannya selama 4 bulan, dan Rp. 150.000 untuk pengisian 3 kali survey yang akan dibagi kedalam 3 kali pencairan (Wijayanti, 2020).

Akhir tahun 2019, pemerintah menetapkan target sasaran sebanyak 2 juta peserta dengan insentif Rp. 300.000 – Rp.500.000 per peserta. Pelatihan dilaksanakan melalui platform digital atau lembaga pelatihan kerja pemerintah/swasta/industri. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 10 triliun (Lidwina, 2019). Akibat COVID-19, pemerintah menaikkan anggaran hingga Rp. 20 triliun untuk target sasaran sebanyak 5,6 juta peserta. Adapun rincian pengeluarannya adalah 1 juta rupiah perorang dibayarkan langsung kepada lembaga pelatihan, insentif pelatihan sebesar 2,4 juta rupiah per orang, dan insentif survei keberkerjaan sebesar 150 ribu rupiah per orang (Siregar, 2020).

Tahapan yang harus diikuti agar dapat menjadi penerima program kartu prakerja antara lain adalah mendaftar melalui website resmi *prakerja.go.id* setelah itu membuat akun berdasarkan data diri yang sesuai dengan KTP atau Kartu Keluarga. Selanjutnya masuk ke dalam tahap seleksi dengan mengikuti tes motivasi kemampuan dasar agar dapat bergabung dalam gelombang pendaftaran yang telah dibuka dan selanjutnya menunggu pengumuman kelulusan. Setelah dinyatakan lulus selanjutnya memilih pelatihan berdasarkan minat pada mitra platform resmi yang melakukan kerjasama dengan program serta melakukan pembayaran pelatihan menggunakan kartu prakerja.

Kemudian mengikuti pelatihan secara online agar dapat menerima sertifikat elektronik tidak lupa memberikan ulasan dan rating terhadap pelatihan yang telah diikuti. Setelah menyelesaikan pelatihan maka penerima program akan mendapatkan insentif yang dapat dicairkan per bulan selama empat bulan (Prakerja, 2020).

Menurut Kemenkeu (2020) dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, untuk mendukung agar program ini dapat berjalan dengan maksimal serta agar terkoordinasi dengan baik, maka dibentuklah komite cipta yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Susunan organisasi Komite Cipta Kerja diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakil ketua yaitu Kepala Staf Kepresidenan adapun anggota dalam komite ini adalah Menteri Sekretaris Negara antara lain:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Pendidikan Kebudayaan
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Menteri Perindustrian
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Sekretaris Kabinet
8. Jaksa Agung
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

11. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden Jokowi berupa kartu prakerja pertama kali dikeluarkan pada masa pandemi tepatnya tanggal 11 April 2020. Program kartu prakerja memiliki platform resmi yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal yang menyangkut program prakerja. Program kartu prakerja diatur dalam peraturan presiden No 74 tahun 2020 atas perubahan dari peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 merupakan pengembangan masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau kompetensi kerja terutama dalam bidang wirausaha yang dituju kepada para pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK pada masa pandemi. Pada implementasinya program ini berfokus pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pada sektor informal.

Herdiamy (2023) sepanjang tahun 2022 Program kartu prakerja telah memberikan manfaat kepada 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan penerima total dari awal program diluncurkan sebesar 14,9 juta penerima. Rizki (2020) menyatakan akses yang diberikan oleh kartu prakerja kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menemukan hal yang baru, memberikan pengetahuan baru, dari yang kreatifitasnya rendah menjadi lebih tinggi serta memiliki keterampilan yang tinggi pula. Proses pelaksanaan kartu prakerja dilakukan secara daring baik pada pengambilan pelatihan maupun

transfer insentif. Penyaluran insentif yang diperoleh penerima program dilakukan melalui transfer bank maupun aplikasi fintech yang telah menjalin kerjasama dengan program. Program kartu prakerja hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak dalam masa pendidikan, baik itu sekolah maupun kuliah. Jika setelah proses pendaftaran dilakukan dan dinyatakan lolos sebagai penerima program, maka selanjutnya akan melakukan pelatihan dan setiap penerima akan mendapatkan insentif.

Selain memberikan insentif, program kartu prakerja bertujuan untuk memberikan pelatihan berupa pengembangan *skill* pada penerimanya. Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas. Pemerintah membuat program ini untuk memberikan akses kepada para pengangguran, pekerja dan pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan seharusnya mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan mejadi batu loncatan agar memiliki kehidupan lebih baik lagi. Program Kartu Pra-kerja ini juga bisa diartikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan stimulus

untuk perbaikan sumberdaya manusia yang merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku yang sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Manusia adalah orangnya, sedangkan SDM harus ditingkatkan supaya produktivitas kerjanya meningkat, sehingga mencapai hidup sejahtera (Yana, 2021).

Program prakerja pada awalnya hanya dibentuk untuk program pelatihan yang bertujuan meningkatkan skill dan daya saing penerimanya, namun selanjutnya program ini ditambahkan dengan skema bantuan sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19. Dengan dua tujuan yang ingin dicapai melalui program ini, maka program harus terlaksana dan menjangkau 5,6 juta penerima dengan persiapan waktu yang terbilang singkat yaitu dengan 1,5 bulan persiapan (Firnanda, 2021).

Menurut (Rozikin et al., 2023) kartu prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak penghidupannya. Dalam pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Terdapat 3 (tiga) tujuan dari program kartu prakerja yaitu mengembangkan kompetensi Angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing

Angkatan kerja, mengembangkan kewirausahaan. Selain tujuan tersebut, sesuai dengan instruksi Presiden, program kartu prakerja ditambahkan dengan program semi bansos bagi para pesertanya melalui skema pemberian insentif pasca pelatihan dalam bentuk e-money. Kemudian beberapa manfaat dari adanya Kartu Prakerja ini diantaranya:

1. Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan
2. Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan
3. Mendorong keberkerjaan seseorang lewat pengurangan mismatch
4. Menjadi komplemen dari pendidikan formal
5. Membantu daya beli masyarakat.

Sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di Indonesia, kartu prakerja menyediakan “pasar” atau marketplace yang mempertemukan peserta dan pemberi pelatihan. Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan voucher pelatihan sebesar lima juta rupiah yang kemudian dapat digunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia. Pelatihan-pelatihan akan diberikan melalui platform digital juga sudah menjadi mitra program ini. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan insentif sebesar enam ratus lima puluh ribu rupiah per bulan setelah pelatihan selama empat bulan.

Terakhir, portal pekerjaan juga akan tersedia untuk memfasilitasi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan (Rafitrandi, 2020).

Program Kartu Prakerja menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan kompetensi tenaga kerja terutama lulusan SMA sederajat maupun perguruan tinggi. Alternatif kebijakan yang memberikan manfaat besar dan biaya kecil adalah dengan memberikan pelatihan kepada para pengangguran. Jika hanya memberikan jaminan sosial tanpa adanya pelatihan kepada pengangguran tidak serta merta meningkatkan rata-rata pendapatan nasional (Panjaitan, 2021).

Program kartu prakerja yang terbuka bagi siapa saja (pekerja dan pengangguran) diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran jika tepat sasaran penerima dari program ini. Jika dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk mendaftar program ini maka dapat disesuaikan jenis program pelatihan, langkah selanjutnya setelah pelatihan berdasarkan rencana masing-masing penerima program. Bagi penerima yang merupakan wirausaha dapat dihubungkan dengan fasilitas kredit dan bagi pekerja dapat dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Program kartu prakerja yang berbasis online ini dapat bekerjasama dengan situs-situs lowongan kerja untuk mempertemukan antara *demand* dan *supply* tenaga kerja (Panjaitan, 2021).

Program pelatihan pada dasarnya berisi aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan pelatihan yang diikuti. Program pelatihan dapat dikatakan efektif apabila mampu membuat peserta latihan menguasai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan setelah mengikuti program pelatihan. Dengan kata lain, setelah selesai mengikuti program pelatihan peserta akan lebih berpengetahuan, lebih trampil, dan memiliki sikap yang lebih positif terhadap bidang yang digeluti. Program pelatihan yang efektif juga ditandai dengan adanya peningkatan motivasi belajar untuk mau mengenali isi atau materi pelatihan yang telah dipelajari dan memiliki sikap antusias terhadap isu atau materi program yang dilatihkan (Mastura, 2022).

Menurut Rawie et al. (2020) pemerintah menciptakan program kartu prakerja sebagai akses terhadap pengangguran, pekerja, maupun pekerja yang telah di PHK untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan dalam bentuk vokasi dan juga sertifikasi kompetensi kerja. Masing-masing layanan vokasi pada program kartu prakerja memiliki pengertian yang berbeda, antara lain adalah:

1. *Skilling*, merupakan pelatihan vokasi yang diberikan kepada pencari kerja atau pengangguran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan keahlian yang dibutuhkan pada dunia kerja sebagai persiapan untuk mencari kerja.

2. *Up-skilling*, pelatihan vokasi yang diberikan pada pekerja dalam meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan karir.
3. *Re-skilling*, pelatihan vokasi diberikan pada pekerja yang telah di PHK atau kemungkinan akan di PHK untuk melatih kemampuan pada keahlian yang baru bertujuan untuk menjadi wirausaha atau beralih pada profesi yang baru pula. *Re-skilling* juga diperuntukkan bagi pekerja yang akan pension agar memiliki potensi dalam berwirausaha.
4. Sertifikasi kompetensi kerja, memberikan sertifikat kompetensi pada para pekerja yang dilakukan dengan sistematis dan obyektif berdasarkan uji kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional atau internasional.

Pelaksanaan pelatihan program kartu prakerja dilakukan dengan metode daring yaitu dengan menggunakan E-learning. Metode daring berarti metode pembelajaran yang dilakukan dengan tidak tatap muka secara langsung melainkan dengan tatap maya yaitu menggunakan bantuan platform yang dapat menghubungkan proses pelatihan antara pendidik dan peserta didik meskipun terhalang jarak. Proses pelatihan dilakukan secara daring maka lingkungan belajar peserta pelatihan dapat berupa di lingkungan fisik dan non fisik. Kondisi lingkungan belajar yang baik akan berpengaruh pada pada proses belajar peseta pelatihan,

dengan lingkungan yang baik seorang peserta pelatihan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam mengikuti proses kegiatan pelatihan sehingga akan lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan hal tersebut berpengaruh pada hasil belajar peserta pelatihan (Nabila, 2023).

Banyaknya jenis pelatihan yang ditawarkan ini menguntungkan bagi pemilik Kartu Prakerja untuk dapat memilih jenis pelatihan sesuai dengan keinginannya. Namun, bagi mitra ini menjadi tantangan agar dapat membuat pelatihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari calon peserta. Dengan demikian, mitra penyelenggara pelatihan yang dilakukan secara daring perlu mengungkap faktor-faktor penentu keputusan mengikuti pelatihan daring khususnya bagi wanita. Hal ini akan membantu mitra untuk dapat menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan preferensi wanita pemilik Kartu Prakerja (Lusianingrum, 2020).

Adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan seharusnya mampu menjadikan masyarakat lebih mandiri dan menjadi batu loncatan agar memiliki kehidupan lebih baik lagi. Program Kartu Prakerja ini juga bisa diartikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan stimulus untuk perbaikan sumber daya manusia yang merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku yang sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Manusia adalah

orangnya, sedangkan SDM harus ditingkatkan supaya produktivitas kerjanya meningkat, sehingga mencapai hidup sejahtera (Anggraeni, 2023).

2.3 Konsep Kesejahteraan

2.3.1 Indikator Kesejahteraan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata *dasae* yaitu sejahtera berarti damai, aman, sentosa, makmur serta selamat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesusahan dan lainnya. kesejahteraan sendiri dalam artian luas memiliki pengertian yaitu terbebasnya seseorang dari masalah kemiskinan, rasa takut, dan kebodohan sehingga orang tersebut memperoleh kehidupan dengan rasa aman dan tentram.

Masyarakat modern mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang, baik itu kebutuhan terhadap makanan, air minum yang bersih, pakaian, tempat tinggal, jaminan sosial dan dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menjadi penunjang bagi kualitas hidupnya sehingga menjadikan status sosialnya sama dengan masyarakat lainnya (Hartono, 2022).

Kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara. Atas dasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara

Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya.(Sukmasari, 2020).

Menurut Huraerah (2019) menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan suatu tujuan serta harapan setiap manusia selaku individu maupun masyarakat dan menjadi tujuan bagi sebuah negara. Alat ukur kesuksesan pemerintahan dalam mengembangkan negara dapat dilihat dari kesejahteraan. Setiap pemerintahan memiliki tujuan yang berbeda dari setiap kesejahteraan, ada yang lebih berfokus pada kemiskinan dan ada pula yang lebih mengupayakan persatuan dalam berbangsa. Kesejahteraan akan menjadi tolak ukur oleh masyarakat bahwa telah mencapai keadaan yang sejahtera. Kesejahteraan umumnya dapat diukur dengan melihat keadaan perekonomian, kesehatan, kebahagiaan serta standar kehidupan masyarakat. Makna lain dari kesejahteraan merupakan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sehat dan produktif.

Kesejahteraan menjadi bagian terpenting dalam suatu negara, karena tujuan utama terbentuknya sebuah negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam negara tersebut. Berbagai cara, aturan, metode, pendekatan, kebijakan, serta alat yang dapat digunakan oleh pemerintah suatu negara agar negara tersebut dapat meraih kesejahteraan. Indonesia adalah salah

satu negara yang kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utamanya. Namun realitanya Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan terkait dengan kesejahteraan. Negara yang seharusnya memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya ternyata masih jauh dari harapan. Masalah terkait dengan perekonomian serta sosial terus bermunculan pada kehidupan masyarakat. Bahkan pada beberapa aspek kehidupan, masyarakat tidak merasakan kehadiran pemerintah di dalamnya (Tamimah, 2021).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. kesejahteraan maupun sejahtera dapat memiliki empat arti. Dimana sejahtera dalam istilah umum, menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi dimana manusia ataupun orang-orangnya dalam keadaan makmur, dan dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial, sejahtera juga memiliki arti khusus atau teknis. Dalam mempresentasikan tingkat kesejahteraan karena keterbatasan indikator ekonomi, masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Dilihat dari indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Tingkat kesejahteraan juga dapat diukur dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan indikator objektif yang diukur

melalui pendapatan, sedangkan berikutnya menggunakan indikator subjektif yang diukur melalui kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungan, keharmonisan keluarga, kondisi rumah dan keamanan. Indikator tersebut memperluas skala pengukuran tingkat kesejahteraan (Purba, 2023).

Kesejahteraan memiliki konsep yang dirumuskan sebagai padanan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri (identity). Tentang kesejahteraan sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Keberhasilan pembangunan manusia khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang semakin mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi. Permasalahan tersebut diantaranya kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal dan selanjutnya muncul pertanyaan bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan (Mulia, 2020).

Tujuan dalam suatu negara yaitu menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat yang

dilakukan dengan upaya pembangunan ekonomi. Pemerintah melakukan kegiatan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan pada daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong rendah, yang menjadi target utama adalah efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Rencana jangka menengah yang menjadi prioritas dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan yang memiliki lima sasaran pokok, yaitu: penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas masyarakat, perbaikan mutu lingkungan hidup, peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam. Pada implementasinya prioritas utama dari pembangunan ekonomi adalah pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, penataan kelembagaan, dan pelaksanaan system perlindungan sosial (Zainollah et al, 2018).

Wiriana et al. (2020) mengartikan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan serta merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pencapaian tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat diraih jika perilaku terhadap tingkat kepuasan berdasarkan pada sumber daya yang sudah ada. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana tidak mendahulukan aspek penting dari isinya. Kesejahteraan sosial merupakan penggabungan antara kesejahteraan dengan pilihan

sosial objektif yang didapatkan dengan meringkas kepuasan dari setiap orang dalam lingkungan masyarakat. Upaya meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis agar masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang terhadap masyarakat menengah ke bawah untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat bertujuan dalam mengatasi keterbelakangan serta peningkatan kualitas masyarakat dalam bersaing secara ekonomi.

Indonesia melaksanakan konsep kesejahteraan dengan menggunakan filosofi, kesejahteraan merupakan hak dari setiap warga negara. Beranjak dari filosofi itu maka fakir miskin yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan seperti yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara umum. Hak untuk hidup sejahtera, dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar memperoleh kehidupan yang layak serta mampu berkembang dan melaksanakan fungsi sosialnya merupakan hak yang harus mereka miliki. Kesejahteraan masyarakat dijadikan sebagai tujuan dari negara Indonesia, rumusan tentang kesejahteraan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan menjadi pembahasan khusus pada Bab IV yang didalamnya meliputi pasal 33 tentang sistem perekonomian, serta pasal 34 membahas kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial (Amelia, 2018).

Kesejahteraan masyarakat selalu berkaitan erat dengan paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat dinyatakan memperoleh keberhasilan bila tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan maka dapat mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan. Ukuran kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Kesejahteraan merupakan sebuah cerminan dari kualitas hidup masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan primer dan terealisasinya nilai-nilai hidup. Pengertian kesejahteraan masyarakat merupakan sistem suatu negara untuk membantu masyarakatnya dalam memperoleh kebutuhan sosial, pendidikan, kesehatan yang penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat negara tersebut. Terdapat pengertian yang berbeda terhadap kesejahteraan karena bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman dan tujuan hidup yang berbeda akan memberikan pandangan dan nilai yang berbeda pula pada kesejahteraan dan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Nartin et al, 2022).

Menurut Al-Farisi (2022) kesejahteraan adalah titik ukur bagi suatu masyarakat yang telah mencapai kondisi sejahtera. Kesejahteraan merupakan persamaan kehidupan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Perasaan senang yang tidak memperoleh kekurangan pada bagian tertentu dan terlepas dari kemiskinan dan bahaya yang mengancam merupakan ciri-ciri tercapainya

kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan individu atau kelompok dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan materi dan spiritual. Kesejahteraan tidak dapat diartikan sebagai materi dan kemewahan tetapi juga mencakup tujuan kemanusiaan dan rohani, sehingga sejahtera tidak hanya terpenuhinya kebutuhan duniawi tetapi juga harus terpenuhi kesejahteraan rohani.

Pada konsep dunia modern kesejahteraan merupakan kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, air bersih, serta kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak sehingga dapat menunjang standar kehidupan. Kesejahteraan hidup dapat terbagi menjadi dua aspek, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial terdiri dari perumahan, hubungan sosial, rasa aman, budaya, kesehatan, lingkungan dan keluarga. Sementara kesejahteraan ekonomi adalah aspek yang meliputi pendapatan dan karir. Kesejahteraan masyarakat memiliki fokus terhadap sumber daya keuangan dan cara penggunaan sumber daya tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Perubahan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pendapatan perkapita, konsumsi, daya beli, jumlah tabungan, jumlah modal, total biaya, perdagangan serta pengeluaran (Nasution et al, 2022).

Teori ekonomi mikro atau disebut juga teori pareto menjelaskan tiga jenis kesejahteraan berdasarkan tingkatannya, pertama pareto optimal, dalam teori ini peningkatan kesejahteraan

individu atau kelompok akan menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan individu atau kelompok lain. Kedua yaitu pareto belum optimal, dalam teori ini kesejahteraan seseorang tidak akan berpengaruh pada kesejahteraan orang lain. Ketiga yaitu pareto superior, teori ini menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi peningkatan kesejahteraan tertinggi orang lain. Menurut teori pareto, bila kondisi kesejahteraan masyarakat telah mencapai pareto optimal maka kebijakan pemerintah tidak ada lagi yang dapat dilakukan (Sari, 2021).

Tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia. Beberapa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar/pokok ini meliputi: makanan, nutrisi, lapangan kerja, kesehatan, perumahan, pendidikan, komunikasi, kebudayaan, penelitian dan teknologi, energi, hukum, dinamika politik dan implikasi ideologi. Konsep kebutuhan pokok/dasar mencakup 2 hal, yaitu *pertama* konsumsi minimum untuk keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan. *Kedua* pelayanan negara (public services) untuk masyarakat pada umumnya, seperti air bersih, transportasi, listrik, dan sebagainya (Budhi, 2021).

Kesejahteraan berdasarkan perumusan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kesejahteraan keluarga berdasarkan pemenuhan kriteria berikut:

1. Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu kebutuhan sandang, pangan, sosial, perumahan, serta agama.
2. Keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
3. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan akan kesehatan setiap anggota keluarga, kehidupan sosial dengan masyarakat sekitar, beribadah dengan baik disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri (identity). Tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga (Mulia et al., 2020).

Kondisi yang sejahtera merupakan keadaan jasmani dan rohani rumah tangga telah terpenuhi sesuai dengan tingkat kehidupannya. Menurut BPS (2020) untuk melihat tingkat kesejahteraan terdapat beberapa indikator, antara lain :

1. Pendapatan, pendapatan atau penghasilan merupakan satu indikator yang dapat menilai kesejahteraan masyarakat.

pendapatan yang dimaksud merupakan total kas yang didapatkan oleh individu maupun rumah tangga dalam rentang waktu tertentu. Pendapatan terbagi atas penghasilan tenaga kerja, tunjangan pemerintah, dan penghasilan atas hak milik (deviden atau sewa).

2. Perumahan dan pemukiman, rumah sebagai tempat untuk tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dasar keluarga dalam meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu rumah juga merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, rumah yang sehat dan nyaman akan menunjang kesehatan tiap penghuninya.
3. Pendidikan, merupakan hak dari setiap warga negara untuk pengembangan potensi diri melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat yang dimiliki dan tidak membedakan status ekonomi, sosial, etnis, budaya, agama, suku, maupun letak geografis dalam dunia pendidikan.
4. Kesehatan, kesehatan termasuk salah satu faktor dari pengukuran kesejahteraan masyarakat dan sebagai indikator dari keberhasilan pembangunan masyarakat. masyarakat yang sakit tidak dapat mencapai kesejahteraan, sehingga upaya-upaya pembangunan pada bidang kesehatan diharapkan dapat menyeluruh di masyarakat dan tidak

terdapat diskriminasi pada proses pelaksanaannya. Kesehatan sebagai bagian dari indikator kesehatan bisa ditentukan dari kemampuan masyarakat dalam menjalani pengobatan pada layanan kesehatan serta dapat membiayai secara penuh layanan kesehatan tersebut.

Pengukuran untuk mengetahui tingkata kesejahteraan ada delapan indikator, antara lain yaitu pendapatan, pengeluaran keluarga, konsumsi, keadaan tempat tinggal, kesehatan setiap anggota keluarga, kemudahan mendapatkan layanan kesehatan, fasilitas tempat tinggal, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, kemudahan memperoleh fasilitas transportasi.

2.3.2 Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Pandangan ekonomi syariah terhadap kesejahteraan mencakup materi dan non materi (psikis), karena kepuasan manusia bukan hanya terletak pada materi tetapi juga mencakup unsur-unsur non materi. Menurut Al-Ghazali kesejahteraan merupakan tercapainya kemaslahatan. Manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan serta kedamaian batin sebelum tercapainya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di muka bumi melalui terpenuhinya kebutuhan materi dan rohani (Suardi, 2021).

Ajaran Islam menjelaskan sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terciptanya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW membangun perekonomian dari keadaan terendah menjadi

perekonomian dunia yang tidak hanya mencakup Jajirah Arab saja. Pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang terletak di Madinah ini membawa kemakmuran dan menyeluruh pada kegiatan perekonomian serta memiliki pengaruh yang cukup besar pada masa itu (Suardi, 2021).

Kesejahteraan berdasarkan Islam mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat (falah) karena manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi di alam setelah kematian juga (akhirat), kecukupan materi di dunia bertujuan untuk memperoleh kecukupan di akhirat, jika kondisi ini tidak tercapai maka kecukupan di akhirat jauh lebih diutamakan karena akhirat merupakan keabadian dan lebih berharga dibandingkan dunia yang bersifat sementara. Dalam ekonomi syariah kesejahteraan merupakan suatu yang menyeluruh antara materi dan spiritual, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya dipandang berdasarkan materi saja, tetapi meliputi moral, spiritual, dan sosial. Kesejahteraan individu dan masyarakat menurut Islam adalah saling melengkapi bukan Saling merasa bersaing atau bertentangan antara keduanya. Adapun nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah antara lain adalah (Hasimi, 2020):

1. Keadilan, berpegang teguh pada nilai kejujuran, kebenaran, serta keberanian
2. Pertanggungjawaban, pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ekonomi yang benar, amanah dalam memperoleh kemaslahatan juga bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh bukan hanya sejahetera dalam ranah pribadi atau pada kelompok tertentu saja.

3. Jaminan sosial (takaful), dengan adanya jaminan sosial maka hubungan yang baik akan tercipta diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan secara vertical tetapi hubungan horizontal juga ditempatkan secara seimbang.

Kesejahteraan dalam Islam merupakan orang yang beruntung dengan mendapatkan rizki yang cukup dan halal, terpenuhinya kebutuhan secara rohani oleh seluruh anggota keluarganya, dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Menurut para ahli indikator dari kesejahteraan berdasarkan Islam adalah kebutuhanle fisik yang terpenuhi dengan jalan yang halal, hidup sehat secara fisik dan psikis, rizki yang diterima berkah, keluarga yang harmonis, rasa cinta kasih, mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan merasa bahagia. Dengan ini maka kesejahteraan bukan hanya diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga memperoleh nilai spiritual (Wahyuni et al, 2022).

Kondisi ekonomi berkaitan dengan status ekonomi yang merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diukur berdasarkan kemampuan seseorang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ekonomi keluarga dapat dilihat dengan menggunakan indikator-indikator tertentu, misalnya keluarga tersebut dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah

tanggung, kondisi rumah, kepemilikan barang-barang, luas lahan, dan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam usaha mencapai kemakmuran yang merupakan suatu keadaan manusia yang dapat memenuhi segala kebutuhannya (Dewi et al., 2021).

Masuknya unsur syariah pada hukum ekonomi Indonesia bukan berarti menjadikan Indonesia mengarah pada ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi hal ini disebabkan ekonomi syariah sudah lama tumbuh dan berkembang bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah merupakan salah satu dari system ekonomi lain seperti sosialis dan kapitalis. Ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat baik secara syar'i maupun konstitusi, secara syar'i ekonomi syariah memiliki landasan dalil yang kuat dan secara konsitusi ekonomi syariah memiliki landasan konstitusional. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berjalan dengan cukup pesat, hal ini juga dikarenakan ekonomi syariah didukung oleh sektor hukum dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur bidang ekonomi syariah. Keluarnya undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan pengadilan agama memiliki kewenangan dalam penanganan perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu juga dikeluarkan Undang-undang

nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 membahas masalah perbankan syariah yang semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia (Syarif, 2019).

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan terdapat pada Qur'an surah Quraaisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya: *“Maka hendaklah mereka menyembah tuhan (pemilik) rumah ini (ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”*.

Berpegang dari ayat di atas maka terdapat tiga indikator daan Islam antara lain adalah (Sodiq, 2015):

1. Ketergantungan penuh manusia kepada Allah SWT.

Indikator ini lebih befokus kepada mental, bila indikator kesejahteraan berupa materi telah terpenuhi belum dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan penuh dan mencapai hidup yang sejahtera. Hal tersebut bisa dibuktikan dari adanya orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan yang banyak serta sumber pendapatan yang melimpah namun hatinya selalu

gelisah dan tidak memiliki ketenangan hidup. Maka dari itu ketergantungan manusia kepada tuhan yang dapat diaplikasikan dalam bentuk ibadah yang dijalankan secara ikhlas merupakan indikator utama dalam mencapai kesejahteraan, karena dengan kedekatan manusia kepada tuhan menjadikan manusia memperoleh kesejahteraan yang hakiki.

2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi

Kata lain dari terpenuhinya kebutuhan konsumsi adalah hilangnya rasa lapar, pada ayat diatas menyebutkan bahwa Allah SWT memberikan mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar, hal tersebut menyebutkan bahwa terpenuhinya kebutuhan konsumsi yang bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh secara berlebihan apalagi sampai melakukan penimbunan. Demi mendapatkan harta yang banyak terlebih lagi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tentu saja hal ini menjauhkan manusia dengan anjuran yang Allah tuangkan dalam surah Quraisy tersebut. Jika hal tersebut dapat dipenuhi maka tidak akan terjadi kejahatan seperti penipuan, korupsi, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain yang dapat dilakukan manusia.

3. Hilangnya rasa takut

Hilangnya rasa takut juga merupakan bentuk lain dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Jika berbagai macam tindak kriminal terjadi dalam lingkungan masyarakat, misal seperti perampokan, pemerasan, dan lain sebagainya maka dapat dikatakan bahwa kenyamanan, kedamaian dan ketenangan tidak terbentuk dalam lingkungan masyarakat, atau dengan kata lain masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan (Sodiq, 2015).

Islam menjelaskan persoalan kesejahteraan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an, Allah telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk hidup lainnya seperti yang telah disebutkan dalam surah Hud ayat 6 yang artinya *“Dan tidak ada satu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang member rezekinya”*, namun jaminan itu juga tidak akan didapatkan bila tanpa usaha dari para hambanya. Sejalan dengan teori kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pemerintah dapat memberikan inisiatif sendiri kepada masyarakat agar lebih kreatif dalam mengelola sumber daya mereka, sehingga dengan pemberdayaan tersebut dapat membentuk mereka dalam mengelola potensi diri masing-masing yang dapat meningkatkan kehidupan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi (Wulandari, 2020).

Menurut Imam Al-Ghazali kesejahteraan dalam suatu masyarakat dalam ekonomi Islam tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*maal*), dan akal (*aql*). Kunci dari pemeliharaan kelima tujuan dasar itu terletak pada pemenuhan kebutuhan tingkat pertama, yaitu kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal (Wulandari, 2020).

Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesejahteraan secara Islam dapat diperoleh melalui pembentukan mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Allah SWT. Pencipta alam semesta dengan cara bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran. Kesejahteraan dalam islam dapat tercapai apabila lima tujuan dasar sudah terpenuhi yaitu sesuai dengan kemaslahatan menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

2.4 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian dari Padilla (2022) yang berjudul Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif, langkah pengolahan data dengan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu prakerja yang dilandasi peraturan preseiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja memperoleh hasil bahwa program tersebut telah berjalan

dengan baik walaupun masih terdapat banyak hambatan antara lain persoalan mengenai informasi tentang program ini harus ditingkatkan lagi, penerima program harus mengikuti pelatihan dengan serius, serta penerima program harus sesuai dengan sasaran. Program ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian dari Memah et al (2022) berjudul Efektivitas Program Kartu Prakerja Era Pandemi Covid-19 Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pada pencapaian tujuan program kartu prakerja memperoleh minat yang tinggi dapat terbukti dengan antusiasme masyarakat, program prakerja dapat mengatasi masalah terkait dengan ketenagakerjaan terbukti dengan persentase dari BPS tentang penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. pada integrasi maka program prakerja harus meningkatkan sosialisasi program, serta adaptasi pada program sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa program kartu prakerja telah efektif dalam pelaksanaannya di tengah pandemic Covid-19.

Berdasarkan penelitian dari Putra (2021) yang berjudul Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Maslahat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep program Kartu Prakerja dalam perspektif maslahat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis formal dan syar'i.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kartu prakerja selain bertujuan mengurangi beban hidup masyarakat akibat pandemi juga bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kartu Prakerja berkaitan langsung dengan masalah mursalah telah sesuai dengan kebijakan dari masalah al-maslahah wa al-murafiq karena berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masarakat dengan memberikan fasilitas pelatihan ketengakerjaan.

Balya (2021) dengan judul Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Maslahah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kartu prakerja di kota Malang telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat banyak hambatan dan menyebabkan beberapa persoalan, diantaranya yaitu mengenai informasi serta sosialisasi perlu ditingkatkan lagi, peserta harus mengikuti pelatihan dengan baik, penerima manfaat harus benar-benar sesuai dengan target/sasaran. Pada tinjauan masalah mursalah sendiri meyakini bahwa kebijakan program ini merupakan ijtihad dari pemerintah yang sangat berpengaruh dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah dalam mengembangkan kesejahteraan umat.

Menurut penelitian dari Yana (2021) berjudul Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Membangun Sumber Daya Manusia Di Tengah Pandemi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas program Kartu Prakerja dalam membangun kualitas

sumber daya manusia dan menentukan peran program Kartu Prakerja dalam membangun kualitas sumber daya manusia di tengah pandemi. Memperoleh hasil bahwa program kartu prakerja kurang efektif dalam membangun sumber daya manusia. namun bila dilihat dari segi kualitas, program ini sangat berperan dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Penelitian dari Hutabarat (2022) dengan judul Efektivitas Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas program Kartu Prakerja di kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu prakerja di kota Pekanbaru belum efektif baik dilihat berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan, dan pemantauan program. Yang menjadi hambatan dalam terlaksananya program ini adalah program ini berasal dari pusat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Riska Padilla (2022)	Tinjauan program berdasarkan perspektif ekonomi syariah	Jenis penelitian adalah penelitian studi pustaka dengan pendekatan yurisprudensi	Pelaksanaan program kartu prakerja yang telah berjalan dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu informasi mengenai kartu prakerja harus ditingkatkan lagi,

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				<p>penerima program harus bersungguh-sungguh dalam menjalani pelatihan, dan penerima program harus tepat dengan sasaran. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam program ini telah berjalan dengan baik.</p>
2.	<p>Natasya Imanuel memah, Joyce Rares, dan Grace Waleleng (2022)</p> <p>J. dan J.</p>	<p>Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.</p>	<p>Lokasi penelitian berada di Provinsi Sulawesi Utara.</p>	<p>Program kartu prakerja berhasil dalam mengatasi masalah terkait ketenagakerjaan di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan data persentase dari BPS tahun 2021. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah sosialisasi tentang langkah-langkah dalam proses pendaftaran. Pada aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi program ini memiliki hasil yang efektif pada masa pandemi Covid-19 di provinsi Sulawesi Utara.</p>
3.	<p>Rifki Mahesa Putra (2021)</p>	<p>Ditinjau berdasarkan kemaslahatan masyarakat.</p>	<p>Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan.</p>	<p>Kartu Prakerja selain bertujuan mengurangi beban hidup masyarakat akibat pandemi juga bertujuan sebagai</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kartu Prakerja telah sesuai dengan kebijakan dari masalah mursalah yaitu al-maslahah wa al-murafiq karena berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masarakat dengan memberikan fasilitas pelatihan ketengakerjaan.
4.	Muhammad Sabiq Balya (2021)	Indikator pengukur efektivitas.	Metode penelitian menggunakan hukum empiris dendan pendekatan yuridis sosiologis, tempat penelitian berada di kota Malang.	Berdasarkan perpres nomor 76 tahun 2020 implementasi dari program ini telah berjalan dengan baik, meskipun memiliki beberapa hambatan seperti informasi dan sosialisas program harus ditingkatkan lagi, program harus ditinjau kembali agar tepat sasaran, serta pelatihan harus dilakukan dengan serius.
5.	Siti Dwi Yana (2022)	Pengukuran program berdasarkan efektivitas, metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.	Perbedaan pada objek penelitian.	Program kartu prakerja kurang efektif dalam membangun sumber daya manusia dan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

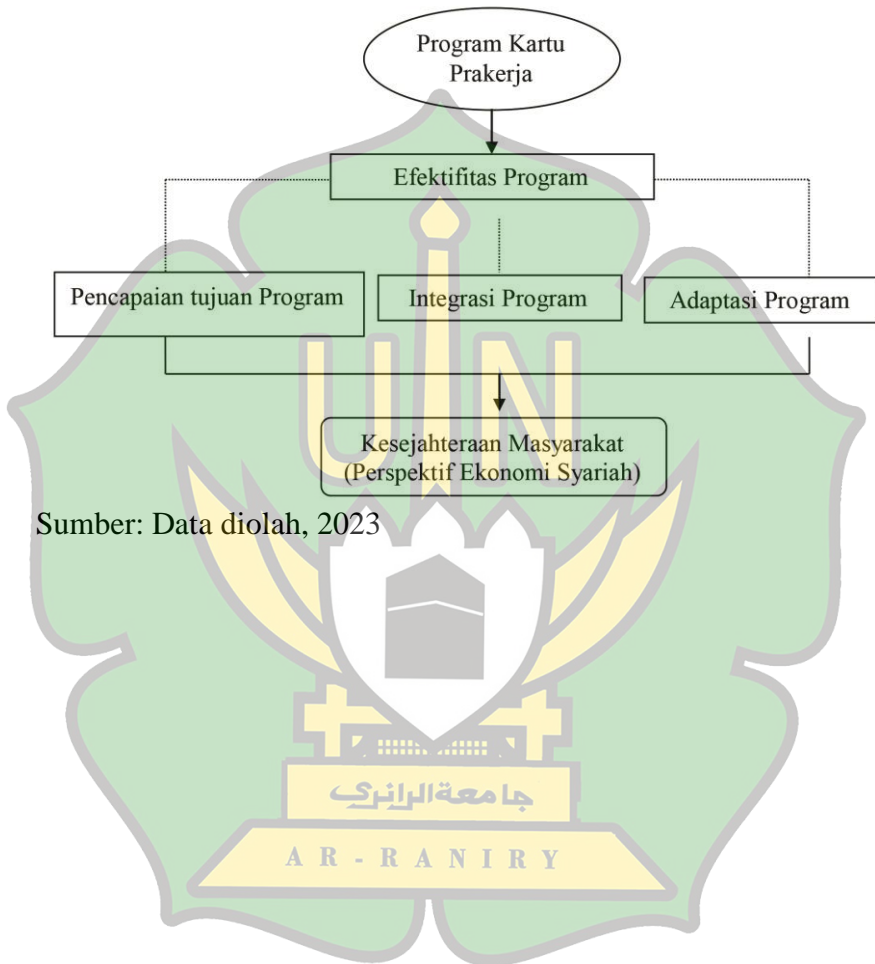
Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
6.	Wiwik Onya Hutabarat	Metode kualitatif, teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Tempat penelitian dan indikator pengukur efektivitas.	Kartu Prakerja belum efektif bila dilihat dari indikator ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan program, serta pemantauan program. Faktor penghambatnya adalah program ini merupakan program pusat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian adalah dasar dari pemikiran suatu penelitian yang terdiri dari susunan fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Melalui kerangka berpikir yang dibuat, maka peneliti dapat menjelaskan secara rinci asal usul dari suatu variable. Kerangka berpikir ini memiliki Manfaat Untuk Menciptakan Pemikiran Yang Sama Antara Peneliti Dan Pembaca Mengenai Alur-Alur pemikiran. Kerangka berpikir adalah sebuah diagram yang memiliki peran sebagai alur logika sistematis terhadap tema yang akan di tulis.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang memiliki fokus pada pengamatan yang mendalam terhadap objek penelitian. Menurut Sugiyono (2018) Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang akan berlandaskan pada filsafat yang dapat digunakan sebagai metode penelitian dengan menetapkan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dan analisis pada penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif lebih cenderung pada pengumpulan data di lapangan di mana peneliti menemukan masalah yang akan diteliti. Informasi diperoleh melalui pembicaraan langsung dengan orang-orang terlibat yang akan dijadikan sebagai sumber informasi dari penelitian dengan melihat langsung tindakan dan perilaku mereka merupakan karakteristik utama dari penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang bertujuan untuk memperoleh teori ataupun pengetahuan terhadap penelitian pada rentang waktu tertentu. Penelitian ini juga digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci. Bertujuan untuk menyelidiki suatu

kondisi ataupun keadaan yang hasilnya kemudian akan dipaparkan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar (Nasution, 2010).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan digunakan metode penelitian kualitatif, maka diharapkan data yang di dapat lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini bukan karena metode ini baru, akan tetapi karena dalam mencari jawaban dari sebuah masalah akan lebih baik hasilnya jika menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang akan memaparkan dan mendeskripsikan informasi mengenai efektivitas dan evaluasi program kartu prakerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kabupaten Gayo Lues berdasarkan pada perspektif masalah mursalah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kabupaten Gayo Lues provinsi Aceh. Sampel dari penelitian akan diambil dari Empat kecamatan yang berbeda di kabupaten Gayo Lues, antara lain yaitu kecamatan Blangkejeren, Blangpegayon, Kuta Panjang dan Pining. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena dinilai lokasi ini mampu

menjawab persoalan yang akan diteliti sehingga peneliti akan mendapatkan data-data dan informasi secara rinci dari informan mengenai efektivitas program kartu prakerja terhadap kesejahteraan masyarakat. penelitian ini dilakukan dari tanggal 19-22 November 2023.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang, atau tempat yang akan diamati pada saat melakukan penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu sebanyak 8 (delapan) orang masyarakat kabupaten Gayo Lues yang menjadi peserta atau dinyatakan lolos sebagai penerima program kartu prakerja dan 3 (tiga) orang perangkat desa. Subjek penelitian akan memberikan tanggapan dan informasi terkait dengan masalah yang akan diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui subjek penelitian akan diperoleh hasil untuk memecahkan rumusan masalah dan menjawab semua pertanyaan pada penelitian tersebut.

Objek penelitian merupakan segala macam permasalahan yang telah ditentukan oleh peneliti bertujuan untuk dipelajari lebih lanjut dan akan diperoleh hasil berupa informasi yang kemudian akan ditarik kesimpulannya. Penentuan objek penelitian yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *Purposive Sampling* yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Penentuan subjek penelitian yaitu penerima

program kartu prakerja yang telah selesai menjalankan program dan berusia 18 tahun keatas.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan skunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung maupun melalui media dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini maka sumber data primer akan diperoleh dari 8 orang informan selaku penerima kartu prakerja dan 3 orang perangkat desa di kabupaten Gayo Lues.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan tidak langsung dari jurnal, buku, laporan, dan juga media lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama proses penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulandata yaitu :

1. Wawancara (interview) Yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau responden untuk memberikan informasi

atas pengamatan dan pengalaman dalam menganalisis penerapan aturan hukum. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengetahui masalah apa saja yang harus diteliti dan memperoleh informasi dengan lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena dari responden yang tidak dapat ditemui melalui observasi. Metode ini digunakan untuk mewawancarai langsung penerima Program Kartu Prakerja mengenai apakah program tersebut efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak.

2. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dan terarah mengenai fenomena-fenomena yang akan diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ismail (2020) observasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki sifat yang lebih spesifik dibandingkan teknik lainnya. Penelitian ini akan melakukan observasi terhadap efektivitas Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah. Kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.
3. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data yang merupakan bahan pustaka yang memiliki kaitan dengan

penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan data tertulis. Mardawani (2020) menyebutkan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencermati dan melakukan analisis terhadap dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi pada penelitian ini berkaitan dengan efektivitas program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan kajian pustaka. Bertujuan agar data yang diperoleh lebih mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang relevan kepada orang lain. Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan setelah data primer yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber. Analisis data merupakan rangkaian proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber lainnya sehingga dapat dipahami oleh peneliti dan menjadi sumber informasi bagi orang lain (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menjabarkan data yang telah terkumpul tersebut. Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan data kualitatif, antara lain sebagai berikut :

1. Reduksi data (data reduction)

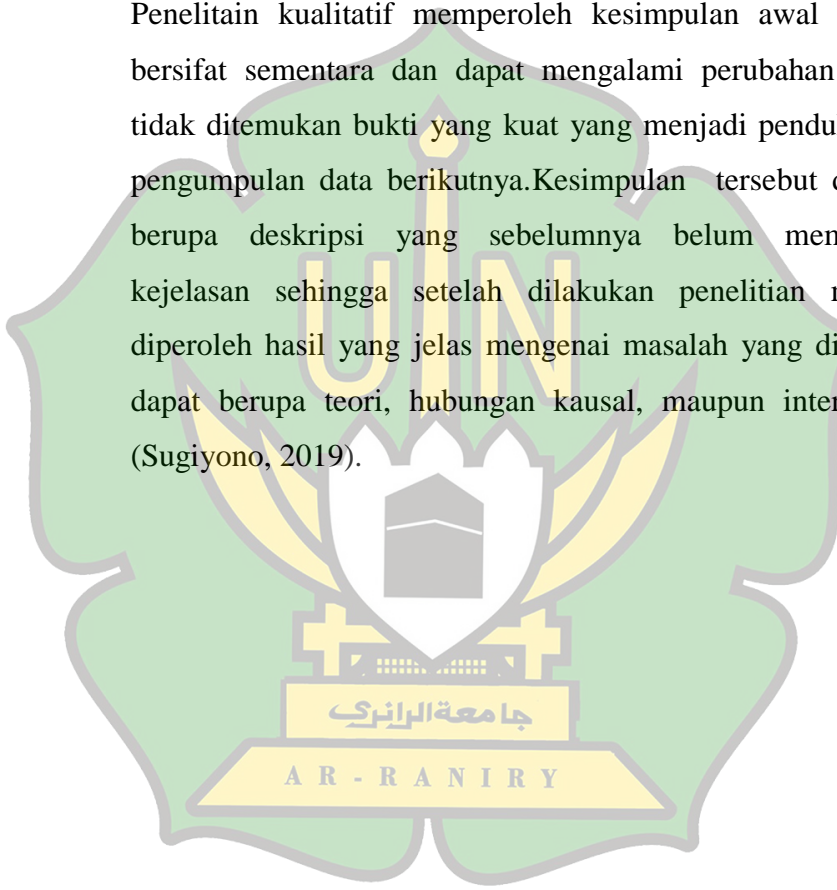
Pada umumnya data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, maka diperlukan pencatatan yang rinci dan teliti. Reduksi data terdiri dari rangkaian proses memilih, memfokuskan dan menyederhanakan. Reduksi data sendiri berarti merangkum, memilih hal-hal yang bersifat pokok, fokus pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Tahapan ini bertujuan untuk mempertajam dan memperjelas data yang selanjutnya akan dilakukan tahapan penyajian data.

2. Penyajian data (data display)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Pada penelitian kualitatif ini penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan memaparkan teks yang memiliki sifat naratif. Perlu dilakukan pengujian terhadap data yang telah ditemukan di lapangan yang masih memiliki sifat antara berkembang atau tidak (Sugiyono, 2019).

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi. Peneliti kualitatif memperoleh kesimpulan awal yang bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang menjadi pendukung pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan tersebut dapat berupa deskripsi yang sebelumnya belum memiliki kejelasan sehingga setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil yang jelas mengenai masalah yang diteliti dapat berupa teori, hubungan kausal, maupun interaktif (Sugiyono, 2019).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang berdiri pada tanggal 11 Maret 2002. Terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Aceh Barat Daya, kabupaten Gayo Lues, kabupaten Aceh Jaya, kabupaten Nagan Raya dan kabupaten Aceh Tamiang. Luas wilayah kabupaten Gayo Lues yaitu 5.719,58 km², Letak secara geografis yaitu berada pada garis lintang 03°40'-04°17' LU dan garis bujur 96°43'-97°55' BT dan berpusat di Blangkejeren. secara administratif batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Timur

Batas sebelah Selatan : Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Aceh Barat Daya

Batas Sebelah Barat : Kab. Aceh Barat Daya

Batas Sebelah Timur : Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Langkat (Provinsi Sumatera Utara).

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25 pemukiman, dan 144 desa. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Pining dengan luas 1617,14 km²

(mencakup 28,27% dari keseluruhan wilayah). Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil terletak pada Blangkejeren yang juga merupakan Ibu Kota dari kabupaten Gayo Lues dengan luas 158,74km². Kabupaten Gayo Lues berada pada ketinggian 500-2000 meter di atas permukaan laut, sebagian besar daerah didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang menjadi alasan daerah ini dijuluki “Negeri Seribu Bukit”. Gayo Lues adalah daerah dengan dataran tinggi yang memiliki suhu dingin dapat mencapai 15° celcius dengan kemiringan lahan berkisar antara 25-40% (Susanti, 2021).

Jumlah penduduk yang berada di kabupaten Gayo Lues berdasarkan data dari badan pusat statistik pada tahun 2022 tercatat sebanyak 103,100 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 19,01 jiwa/km². Berdasarkan luas wilayah per kecamatan, maka penduduk terpadat berada di kecamatan Blangkejeren dengan kepadatan rata-rata mencapai 195 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di kecamatan Pining mencapai 4,01 jiwa/km².

Tabel 4.1
Data Penduduk Kabupaten Gayo Lues

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Kuta Panjang	9.700	36 /km ²
2.	Blang Jerango	7.500	20 /km ²
3.	Blangkejeren	32.400	195 /km ²
4.	Puteri Betung	9.700	10 /km ²

Tabel 4.1-Lanjutan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
5.	Dabun Gelang	7.100	16 /km ²
6.	Blang Pegayon	6.600	24 /km ²
7.	Pining	5.200	4,01 /km ²
8.	Rikit Gaib	4.700	18 /km ²
9.	Pantan Cuaca	4.500	15 /km ²
10.	Terangun	9.800	15 /km ²
11.	Tripe Jaya	5.900	14 /km ²
Jumlah		103.100	19 /km ²

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Mata pencaharian utama masyarakat kabupaten Gayo Lues adalah terletak pada sektor pertanian kemudian diikuti dengan sektor lainnya seperti peternakan, pariwisata, UMKM dan lain sebagainya. Itu artinya basis perekonomian terletak pada sektor pertanian. Adapun komoditas unggulan di daerah ini adalah sere wangi, jagung, tembakau, kakao, padi, kopi, cabai, dan lain sebagainya.

Letak geografis Kabupaten Gayo Lues yang sebagian besar didominasi oleh pegunungan menyebabkan tidak semua daerah memiliki akses internet yang baik. terdapat beberapa daerah yang memiliki akses internet buruk, bahkan ada pula beberapa daerah yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Adapun daerah yang memiliki akses internet buruk terdapat di kecamatan Putri Betung, namun ada beberapa desa di daerah tersebut yang

memiliki akses internet cukup baik. Selanjutnya yaitu kecamatan Pining yang sama sekali tidak memiliki akses internet, jadi bagi masyarakat yang ingin mengakses internet harus menempuh jarak sekitar 3 km. Kemudian kecamatan Terangun dan Tripe Jaya sebagian besar desa tidak memiliki akses internet. Delapan kecamatan lainnya sudah memiliki akses internet dengan kualitas cukup baik (Akbar, 2023).

4.1.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah merupakan karakteristik dari informan yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini terdiri dari keucik/perangkat desa dan masyarakat yang menjadi penerima program kartu prakerja. Wawancara dilakukan secara langsung dan melalui telepon dengan beberapa informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan efektivitas program pemerintah berupa program kartu prakerja terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah.

Tabel 4.2

AR Subjek Penelitian

a. Perangkat Desa

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia	Alamat	Status
1.	Mahdi	Laki-laki	46	Pining	Perangkat Desa
2.	Ramdani	Laki-laki	50	Penampaan Uken	Sekretaris Desa
3.	Jaini Marten	Laki-laki	35	Kuta panjang	Perangkat Desa

b. Masyarakat Penerima Program Kartu Prakerja

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Alamat	Pekejaan
1.	Lela Wati	Perempuan	31	Kerukunan Kuta Panjang, Kec. Kuta Panjang,	Ibu Rumah Tangga
2.	Gusti Randa	Laki-laki	26	Kerukunan Kuta Panjang, Kec. Kuta Panjang	Wirausaha
3.	Sumiati	Perempuan	36	Penampaan Uken, Kec. Blangkejeren	Ibu Rumah Tangga
4.	Khairul Abdi	Laki-laki	27	Raklung, kec. Blangkejeren	Petani
5.	Neli	Perempuan	30	Pining, Kec. Pining	Wirausaha
6.	Mutiara Sari	Perempuan	25	Pintu Rime, Kec. Pining	Ibu Rumah Tangga
7.	Suarni	Perempuan	44	Siongal-Ongal, Kec. Putri Betung	Wirausaha
8.	Ali	Laki-laki	24	Gumpang Pekan, Kec. Putri Betung	Wirausaha

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues

Kartu prakerja merupakan salah satu program dari pemerintah yang digalangkan oleh presiden Jokowi yang bertujuan untuk membina masyarakat Indonesia agar memiliki keterampilan

kerja. Program ini memberikan pelatihan kerja serta bantuan insentif dengan mengoptimalkan tempat pelatihan baik yang berada dibawah kementerian maupun tempat pelatihan swasta (Consuello, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada empat kecamatan yang berada di kabupaten Gayo Lues pada tanggal 19-22 November 2023, dapat dilihat bahwa program kartu prakerja diterima dengan baik dan mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Informasi terkait pelaksanaan program sebagian besar diketahui oleh masyarakat melalui media sosial. Namun ada juga beberapa masyarakat yang mengetahui program ini melalui pemberitahuan oleh perangkat desa setempat. Tujuan utama masyarakat mendaftarkan diri sebagai penerima program kartu prakerja sebagian besar adalah untuk memperoleh insentif.

Pogram kartu prakerja yang dilakukan secara *online* dalam setiap proses pelaksanaannya tentu saja mempermudah masyarakat dalam mengakses program yang dapat dilakukan dari rumah tanpa harus pergi ke instansi tertentu untuk mendaftar sebagai penerima. Namun hal ini juga menjadi kendala bagi masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara penggunaan internet khususnya dalam proses pendaftaran dan pelatihan menjadi suatu permasalahan yang juga terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Permasalahan tersebut menyebabkan pendaftaran dan pelatihan dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar kesepakatan bersama, jadi

penerima program hanya mendapatkan insentif yang juga akan dibagi dengan pihak ketiga. Permasalahan tersebut tentunya menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan utama program kartu prakerja yaitu memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan potensi kerja penerima program. Namun, perangkat desa berupaya mengatasi hal tersebut dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftar program prakerja yang terkendala dalam pemahaman tata cara pendaftarannya yakni masyarakat dapat langsung mendatangi kantor desa untuk dibantu oleh pihak perangkat desa dalam melakukan pendaftaran program prakerja. Selanjutnya untuk tahap pelatihan dan evaluasi program diserahkan oleh perangkat desa setempat ke pihak pusat selaku pelaksana program prakerja. Hal ini disampaikan dalam wawancara peneliti dengan salah satu penerima program kartu prakerja dari Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.

Kendala lain yang dihadapi oleh masyarakat yakni tidak semua daerah di kabupaten Gayo Lues memiliki akses internet yang stabil, bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali tidak memiliki jaringan internet. Maka dari itu, masyarakat memerlukan usaha untuk menemukan lokasi dengan akses internet yang memadai untuk melakukan pendaftaran dan pelatihan program prakerja. Namun, terdapat beberapa penerima yang terkendala jaringan dan justru memilih untuk meminta bantuan pihak ketiga dalam proses pendaftaran dan pelatihan program tersebut sehingga penerima program hanya mendapatkan insentifnya saja dan akan

dibagi insentif tersebut dengan pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Hal ini disampaikan langsung oleh informan dalam wawancaranya dengan peneliti yang merupakan salah satu penerima program yang berasal dari Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.

Secara teknis terdapat kendala yang dihadapi saat proses pendaftaran, yaitu pada saat melakukan registrasi data diri muncul pemberitahuan bahwa data tidak sesuai dengan dukcapil meskipun data yang diisi telah sesuai dengan data diri berdasarkan KTP. Untuk mengatasi kendala tersebut bisa dilakukan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu secara *online* kepada Dukcapil namun memerlukan waktu cukup lama untuk diproses kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramdani selaku Sekretaris Desa Penampaan Uken Kabupaten Gayo Lues bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat juga turut menjadi perhatian dari perangkat desa. Bagi masyarakat yang terkendala dalam proses pendaftaran karena keterbatasan kemampuan dalam penggunaan teknologi akan dibantu oleh perangkat desa mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pencairan insentif. Namun khusus untuk pelatihan yang disediakan pada program ini harus dilakukan oleh penerima yang bersangkutan agar tujuan utama dari program ini dapat tercapai.

Program kartu prakerja memiliki tujuan awal yaitu sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh pelatihan yang telah disediakan secara gratis oleh pemerintah. Selain pelatihan, program

ini juga memberikan insentif pada penerimanya. Pencairan insentif dapat dilakukan dengan menggunakan rekening bank atau ATM yang sesuai dengan nama penerima program. Namun bila penerima tidak memiliki rekening bank juga bisa menggunakan *e-wallet*. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank juga tetap bisa mencairkan insentif melalui *e-wallet*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan penerimaan positif masyarakat terhadap program kartu prakerja. Temuan sebelumnya mengenai antusiasme tinggi, peran media sosial sebagai sumber informasi utama, kendala teknologi, dan peran perangkat desa dalam membantu masyarakat juga ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kendala dan potensi perbaikan yang diidentifikasi sebelumnya tetap relevan dalam pelaksanaan program di Kabupaten Gayo Lues (Ningrum et al., 2022).

4.2.2 Efektivitas Program Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

Secara bahasa efektivitas diambil dari kata “efek” yang artinya akibat atau pengaruh. Secara umum, efektivitas menunjukkan keberhasilan tujuan tergantung tercapai atau tidak program tersebut. Jika hasilnya semakin dekat dengan target, maka semakin tinggi efisiensinya. Sedangkan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Ria, 2023).

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang mencakup berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Konsep ini tidak hanya terkait dengan produktivitas, tetapi juga dengan persepsi dan sikap individu. Dalam organisasi, efektivitas melibatkan pencapaian tujuan dengan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya seperti sarana, prasarana, anggota kelompok, model, dan metode. Keadaan efektivitas tercermin dalam sejauh mana rencana berhasil dilaksanakan sesuai tujuan awal, dengan keterkaitan antara hasil yang dicapai dan rencana yang telah dibuat. Efektivitas memiliki dualitas secara teoritis dan praktis yakni mencerminkan ketelitian yang menyeluruh dan mendalam terhadap efisiensi serta memberikan masukan penting terkait produktivitas. Sebagai tolak ukur, efektivitas memberikan gambaran sejauh mana target yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai, memperlihatkan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan dan kemajuan suatu entitas termasuk dalam pelaksanaan program kartu prakerja.

Dalam segi efektivitas, peneliti meninjau efektivitas program kartu prakerja terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gayo Lues sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan dan penghidupan ekonomi warga dalam dua aspek utama, yakni sosialisasi program kepada

masyarakat dan ketepatan sasaran program kartu prakerja. Hal ini ditujukan pada perangkat desa setempat di Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan perangkat desa yang berada di kabupaten Gayo Lues pada tanggal 19-22 November 2023, dapat dilihat bahwa dari segi sosialisasi, ketiga desa di Kabupaten Gayo Lues tersebut tidak melakukan sosialisasi khusus untuk pengenalan program kartu prakerja kepada masyarakat setempat, namun dua desa lainnya masih berusaha mengadakan pemberitahuan kepada masyarakat dengan membuat pengumuman khusus terkait dibukanya program kartu prakerja dengan mengumumkannya di masjid setelah shalat berjama'ah dan pemberitahuan dari satu individu yang disebarakan ke individu lainnya.

Hasil wawancara diatas mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan sosialisasi program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues. Dari ketiga desa yang menjadi objek penelitian, terlihat bahwa dua desa masih aktif berusaha menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pengumuman di masjid dan pemberitahuan dari satu individu yang disebarakan ke individu lainnya. Meskipun langkah ini telah menunjukkan upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun perlu diperhatikan bahwa pengumuman tersebut mungkin belum mencakup seluruh elemen masyarakat yang berpotensi menjadi peserta program. Di sisi lain, satu desa tidak melakukan sosialisasi khusus terkait pengenalan program kartu prakerja kepada

masyarakat setempat. Hal ini dapat berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait program tersebut di desa tersebut. Dengan minimnya sosialisasi, potensi penerima manfaat program mungkin belum tergali secara maksimal.

Selanjutnya dalam ketepatan sasaran, berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dari ketiga desa tersebut bahwa dinyatakan bahwa program kartu prakerja ini sudah tepat sasaran dimana penerima program adalah mereka yang berhak menerima program ini untuk mengikuti pelatihan kerja. Namun, jika dilakukan analisis lebih lanjut terkait dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap partisipasi masyarakat dalam program kartu prakerja, dapat diamati bahwa kelompok sasaran tidak mengetahui atau kurang paham mengenai program tersebut sehingga menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas program yang diinginkan. Oleh karena itu, pengadaan sosialisasi oleh perangkat desa setempat perlu dipertimbangkan agar program kartu prakerja dapat lebih merata dan efektif menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya di Kabupaten Gayo Lues secara menyeluruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi program di tingkat desa dan dampaknya bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi dan pelatihan kerja masih belum dijalankan dengan baik.

Selain itu, penilaian efektivitas program kartu prakerja terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gayo

Lues juga ditinjau dari sisi masyarakat di empat kecamatan Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat ditemukan bahwa pelatihan yang dipilih setelah dinyatakan lulus sebagai penerima program kartu prakerja yaitu dari kalangan wanita khususnya ibu rumah tangga dominan memilih pelatihan memasak, sedangkan dari kalangan pria khususnya pelaku usaha dominan memilih pelatihan wirausaha dalam hal pengembangan diri dan karir. Jika diamati dari tingkat keseriusan masyarakat dalam mengikuti pelatihan, sebagian masyarakat begitu serius mengikuti serangkaian yang disediakan oleh penyelenggara bahkan turut menerapkan *output* yang diperoleh dari pelatihan tersebut ke dalam pekerjaannya sehari-hari. Dalam hal ini disampaikan oleh salah satu penerima program kartu prakerja yang menerapkan hasil pelatihan tersebut ke dalam pekerjaannya di bengkel motor. Namun, sebagian masyarakat juga tidak menunjukkan keseriusan dalam mengikuti pelatihan dikarenakan lebih menyibukkan diri melakukan kegiatan lainnya di rumah seperti halnya ibu rumah tangga yang sibuk mengurus anak dan pekerjaan rumah sehingga mereka hanya mengharapkan insentif dari program kartu prakerja. Dengan demikian, tujuan dari pengadaan program kartu prakerja yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dunia kerja tentu tidak dapat tercapai secara maksimal.

Selanjutnya dari segi penerimaan insentif, penerima program kartu prakerja di tiga desa Kabupaten Gayo Lues

memanfaatkan insentif yang diberikan per bulannya sebesar Rp600.000,- sebagai tambahan modal usaha dan juga sebagian dari mereka disisihkan untuk tambahan kebutuhan harian. Sehingga dengan adanya insentif ini tentu memberikan perubahan nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dari sebelum dan sesudah menerima program kartu prakerja. Dengan demikian, program ini sekilas telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

Dalam wawancara ditemukan pula fakta bahwa sebagian penerima program kartu prakerja ini turut mengalami perkembangan dalam usahanya akibat keseriusannya dalam mengikuti pelatihan prakerja. Bahkan ada salah satu penerima program tersebut yang berhasil mempelajari cara membuat bakso saat pelatihan hingga bisa membuka warung bakso di rumah. Sehingga, melalui program prakerja ini telah memberikan kepuasan tersendiri bagi penerima bukan hanya dari segi penerimaan insentif namun juga kepuasan lebih bagi masyarakat selaku penerima program yang telah sangat serius dalam menjalankan pelatihan selama program berlangsung. Namun bagi masyarakat yang tidak menunjukkan keseriusannya tentu kepuasan ini hanya diperoleh semata dari pendapatan insentif saja setiap bulannya bahkan mereka masih mengakui tidak puas dengan program ini karena insentif yang diperoleh tidak begitu besar dan program ini hanya bisa diikuti satu kali oleh masing-masing individu.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya kesenjangan sosialisasi program kartu prakerja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan menekankan variasi dalam keseriusan dan kepuasan penerima program terkait pelatihan dan insentif. Program ini memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat meskipun masih terdapat keluhan terkait besaran insentif dan keterbatasan partisipasi program (Ria, 2023).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat dievaluasi dari beberapa aspek, diantaranya program ini memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dengan memberikan pelatihan keterampilan dan insentif finansial kepada peserta, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha. Evaluasi perlu memperhitungkan peningkatan pendapatan peserta, perkembangan usaha kecil, dan peluang pekerjaan baru yang muncul. Peningkatan keterampilan peserta melalui pelatihan menjadi indikator penting untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja atau membantu mereka mengelola usaha secara lebih efektif. Aspek partisipasi masyarakat juga perlu dievaluasi dikarenakan partisipasi masyarakat yang tinggi menandakan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap program ini. Distribusi insentif dan peluang pelatihan harus dinilai secara cermat untuk memastikan keadilan dan manfaat ekonomi

yang optimal. Dalam nilai-nilai ekonomi syariah, evaluasi juga seharusnya mempertimbangkan sejauh mana program ini mematuhi prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika ekonomi syariah.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas Program Kartu Prakerja terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gayo Lues, terdapat beberapa kelemahan utama adalah terbatasnya cakupan sosialisasi program. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk memberi tahu masyarakat tentang program Kartu Prakerja, masih ada desa yang tidak melakukan sosialisasi khusus. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap program tersebut. Lebih lanjut, kurangnya sosialisasi dapat menghambat potensi penerima manfaat program yang belum tergalai secara maksimal. Kemudian, meskipun program ini telah dianggap tepat sasaran oleh perangkat desa, namun dengan kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak sepenuhnya memahami atau menyadari program tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dan keseriusan masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang ditawarkan. Selain itu, meskipun ada peningkatan kesejahteraan yang terlihat dari penerimaan insentif dan perkembangan usaha kecil, masih ada keluhan tentang besaran insentif yang dirasa kurang dan keterbatasan partisipasi program. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mungkin belum optimal dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Terakhir, meskipun terdapat kesuksesan individu yang mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, tidak semua masyarakat menunjukkan keseriusan yang sama. Beberapa di antara mereka hanya mengandalkan insentif bulanan tanpa mengambil manfaat dari pelatihan yang ditawarkan bahkan beberapa diantaranya melibatkan pihak ketiga guna mempermudah pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Dengan demikian, Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Meskipun terdapat beberapa dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat dan kesuksesan individu dalam mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki.

4.2.3 Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues

Pandangan ekonomi syariah terhadap kesejahteraan mencakup materi dan non materi (psikis), karena kepuasan manusia bukan hanya terletak pada materi tetapi juga mencakup unsur-unsur non materi. Manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan serta kedamaian batin sebelum tercapainya kesejahteraan yang sesungguhnya dari seluruh umat manusia di

muka bumi melalui terpenuhinya kebutuhan materi dan rohani (Suardi, 2021).

Program kartu prakerja bila ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah memberikan dampak baik kepada para penerimanya, salah satunya adalah memotivasi masyarakat untuk bekerja. Dalam Islam bekerja merupakan salah satu amal saleh yang menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik termasuk kedalam jihad di jalan Allah. Selain itu bekerja juga dapat menghindari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hakikat Islam yang tidak menghendaki umatnya menjadi miskin karena kesejahteraan umat merupakan bagian terpenting. Selain memotivasi untuk bekerja, kartu prakerja juga memberikan jalan kepada penerimanya untuk terus belajar dan mendapatkan ilmu baru dalam bentuk pelatihan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pengembangan diri, karena belajar juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang dilandasi dengan iman dan nilai-nilai moral.

Tinjauan ekonomi syariah terhadap program kartu prakerja dapat dilihat dari segi sosialisasi, terlihat bahwa satu desa tidak melibatkan kegiatan sosialisasi khusus terkait program kartu prakerja. Dalam konsep ekonomi syariah, hal ini dapat dianggap sebagai ketidaksetaraan akses dan informasi yang dapat mempengaruhi keadilan distribusi manfaat program. Sebaliknya, dua desa yang menggunakan masjid sebagai media sosialisasi dapat diapresiasi dari perspektif ekonomi syariah karena masjid

sering dianggap sebagai pusat ekonomi dan sosial dalam masyarakat Islam.

Dari sudut pandang partisipasi dan dampak ekonomi, terlihat bahwa program ini tepat sasaran, namun dengan minimnya sosialisasi tentu dapat menghambat partisipasi program prakerja. Dampak positif dari pelatihan terutama dirasakan oleh ibu rumah tangga dan pelaku usaha adanya pemberian insentif sebagai tambahan modal usaha. Dari perspektif ekonomi syariah, pelatihan yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dapat dianggap sebagai implementasi prinsip keadilan dan inklusivitas ekonomi.

Meskipun demikian, terdapat keluhan dari masyarakat terkait besaran insentif dan frekuensi program yang hanya dapat diikuti satu kali. Dari perspektif ekonomi syariah, penting untuk menilai keadilan distribusi insentif agar program ini tidak hanya memberikan manfaat sementara tetapi juga memberikan peluang partisipasi yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Peran lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.

Selain memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues juga menciptakan peluang ekonomi yang signifikan. Pelatihan yang diadakan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta, tetapi juga memberikan dorongan ekonomi, terutama bagi

ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Pemberian insentif sebagai modal tambahan usaha menjadi poin positif, mendukung ekonomi peserta program dan mendorong keberlanjutan usaha mereka. Meskipun demikian, respons masyarakat terkait besaran insentif dan frekuensi program yang terbatas menunjukkan perluasan cakupan evaluasi. Penting untuk menilai distribusi insentif dengan lebih cermat, memastikan keadilan dalam penentuan besaran insentif dan mempertimbangkan frekuensi partisipasi. Ini akan memastikan bahwa manfaat program tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan peluang partisipasi yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Selanjutnya, evaluasi program kartu prakerja sebaiknya melibatkan aspek-aspek nilai ekonomi syariah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, program dapat lebih efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang mengutamakan keberlanjutan dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan program kartu prakerja untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat juga dapat ditinjau berdasarkan tiga aspek berikut yaitu ketergantungan penuh manusia kepada Allah SWT, terpenuhinya kebutuhan konsumsi, dan hilangnya rasa takut.

Ekonomi syariah mendorong penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa perekonomian mendukung keberlanjutan usaha masyarakat tanpa melibatkan elemen yang bertentangan dengan hukum Islam. Tujuan kesejahteraan bersama menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam aktivitas ekonomi memberikan manfaat tidak hanya pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, ketergantungan penuh kepada Allah dalam ekonomi syariah bukan hanya sebagai dimensi spiritual, melainkan juga menjadi dasar bagi kebijakan dan tindakan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam untuk mencapai kesejahteraan. Adanya keluhan terkait besaran insentif dan frekuensi program menunjukkan perlunya penilaian keadilan distribusi insentif agar program ini tidak hanya memberikan manfaat sementara, tetapi juga memberikan peluang partisipasi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Dari segi kesejahteraan masyarakat, program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues telah memberikan dampak positif, khususnya bagi ibu rumah tangga dan pelaku usaha. Pemberian insentif sebagai tambahan modal usaha juga diidentifikasi sebagai faktor pendukung ekonomi peserta program. Namun, adanya keluhan dari masyarakat mengedepankan pentingnya evaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi syariah untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaan

program, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh sesuai dengan tuntunan Allah SWT.

Selain itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dan distribusi yang merata. Dalam konteks ini, pengelolaan ekonomi harus mendorong pembagian kekayaan dan manfaat ekonomi secara adil di antara semua anggota masyarakat. Prinsip ini juga berlaku dalam pelaksanaan program-program konsumtif, seperti Kartu Prakerja, di mana distribusi manfaat harus mengikuti prinsip keadilan dan inklusivitas. Bukan hanya itu, terpenuhinya kebutuhan konsumsi dalam ekonomi syariah juga melibatkan pemikiran tentang keberlanjutan. Upaya pemenuhan kebutuhan harus diarahkan pada keberlanjutan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam dan manusia harus seimbang, dan kegiatan konsumsi tidak boleh merugikan lingkungan atau menghasilkan dampak negatif jangka panjang.

Dengan demikian, dalam prinsip ekonomi syariah menekankan pada pentingnya usaha yang halal dan distribusi kekayaan yang adil. Peserta program kartu prakerja diharapkan untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan untuk mengembangkan usaha yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja, peserta diharapkan tidak hanya fokus pada pengembangan diri sendiri

tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti distribusi yang adil dan keberlanjutan, menjadi kunci dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi syariah dapat memastikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada hasil ekonomi semata, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam perwujudan program Kartu Prakerja, peserta diharapkan menggunakan insentif dan pelatihan yang mereka terima secara bijaksana untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi mereka. Prinsip ekonomi syariah mengajarkan bahwa keberlanjutan ekonomi harus dipertahankan, dan pemborosan yang berlebihan dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, peserta program kartu prakerja diharapkan tidak hanya memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya yang diberikan oleh program ini.

Dengan demikian, pelaksanaan program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues apabila ditinjau dari perspektif ekonomi syariah maka menunjukkan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti ketergantungan penuh kepada Allah, terpenuhinya kebutuhan

konsumsi dengan memperhatikan prinsip halal, keadilan distribusi manfaat, dan keberlanjutan, menjadi landasan utama evaluasi. Meskipun terdapat keluhan terkait besaran insentif dan frekuensi program, evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi syariah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program kartu prakerja. Program ini telah memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan keterampilan dan pendapatan, tetapi penting untuk memastikan keadilan distribusi manfaat, pemenuhan kebutuhan konsumsi yang sesuai prinsip syariah, serta memberikan kepastian dan keberlanjutan jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut Imam Al-Ghazali kesejahteraan dalam suatu masyarakat dalam ekonomi Islam tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*maal*), dan akal (*aql*). Oleh karena itu, diperlukan perbandingan antara pemeliharaan lima tujuan dasar dengan realita yang terjadi di lapangan. (Wulandari, 2020).

Lima tujuan dasar yang akan menjadi perbandingan dengan program kartu prakerja yaitu yang pertama menjaga agama (*ad-dien*) berarti melindungi dan menjaga agama merupakan tujuan dari syariat Islam yang dilakukan dengan melaksanakan kewajiban keagamaan. Dalam program ini, aspek-aspek dalam implementasi program, seperti pelatihan dan pemberian insentif, dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang mendukung pemenuhan kewajiban keagamaan dan melindungi nilai-nilai agama Islam. Kemudian,

program kartu prakerja memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Peningkatan kapasitas individu dalam dunia kerja, program ini membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban keagamaan, termasuk tanggung jawab dalam mencari nafkah dan berkontribusi pada kehidupan sosial ekonomi. Kemudian pemberian insentif sebagai tambahan modal usaha dapat diinterpretasikan sebagai langkah yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat dalam kerangka prinsip keagamaan. Insentif ini dapat membantu peserta untuk melaksanakan kewajiban zakat dan berkontribusi pada kesejahteraan umum, sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang menekankan pentingnya berbagi rezeki dengan sesama. Dengan demikian, program kartu prakerja dapat dianggap sebagai inisiatif yang berpotensi memelihara agama, dikarenakan melalui pemberdayaan ekonomi dan menyertakan masyarakat, program ini mendukung pemenuhan kewajiban keagamaan dan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dasar kedua adalah menjaga jiwa (*An-nafs*) merupakan penjagaan terhadap jiwa dan raga. Program kartu prakerja ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gayo Lues melalui pemberdayaan ekonomi, yang pada gilirannya dapat

memengaruhi kondisi jiwa dan raga individu peserta program. Melalui pelatihan yang diberikan dalam program kartu prakerja, peserta dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha sendiri. Dengan demikian, program ini dapat memberikan manfaat langsung terhadap kehidupan ekonomi peserta, mengurangi tekanan finansial, dan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi yang lebih baik dapat menjadi faktor penting dalam penjagaan jiwa dan raga, mengurangi stres dan beban mental yang mungkin timbul akibat ketidakpastian ekonomi.

Selain itu, pemberian insentif sebagai tambahan modal usaha juga dapat memperkuat kondisi ekonomi peserta, memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan yang dapat berdampak pada kesejahteraan jiwa dan raga. Dengan memiliki sumber daya finansial yang lebih stabil, peserta dapat merasa lebih aman dan mampu mengatasi tantangan hidup sehari-hari. Dengan demikian, program kartu prakerja dapat menjadi upaya yang dapat berkontribusi pada pemenuhan maqashid syariah an-nafs dengan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi peserta program yaitu masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang dapat mendukung penjagaan jiwa dan raga mereka.

Tujuan dasar ketiga adalah menjaga akal (*Al-aql*) merupakan penjagaan terhadap akal pikiran. Program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues memiliki potensi yang

berpengaruh positif terhadap pemenuhan tujuan dasar yang ketiga, yaitu Al-aql. Dengan menyediakan pelatihan dan insentif untuk masyarakat, program ini dapat meningkatkan kapasitas intelektual dan kemampuan peserta dalam konteks pekerjaan dan usaha. Melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan, masyarakat Kabupaten Gayo Lues dapat memanfaatkan akal pikiran mereka secara lebih efektif dalam mengelola karir atau bisnis yang sejalan dengan prinsip Al-aql.

Selain itu, pelatihan yang diselenggarakan dalam program ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mereka tentang dunia kerja atau bisnis, mendukung pengembangan keterampilan kognitif, dan meningkatkan kecerdasan praktis mereka. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam aspek-aspek kehidupan ekonomi.

Selanjutnya, dengan melibatkan masyarakat dalam program ini juga menciptakan pengalaman belajar praktis yang dapat membentuk pola pikir dan kemampuan analisis yang lebih matang. Ini berkontribusi pada pemenuhan prinsip Al-aql dengan mendorong penggunaan akal pikiran dalam pengambilan keputusan sehari-hari, baik dalam mengelola keuangan pribadi maupun mengembangkan usaha. Dengan demikian, program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues dapat menjadi bentuk inisiatif dalam

mendukung pemenuhan Al-aql dengan memberikan kesempatan dan sumber daya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengoptimalkan akal pikiran mereka dalam meraih kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dasar keempat adalah menjaga keturunan (*An-nasb*). Adanya program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan tujuan dasar yang keempat, yaitu An-nasb. Program ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk perkembangan dan penjagaan keturunan. Melalui pelatihan dan insentif yang diberikan, program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Gayo Lues untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang pekerjaan. Dengan demikian, peserta program memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau mengembangkan usaha mereka sendiri, memberikan dasar ekonomi yang lebih kokoh bagi keluarga.

Selain itu, kesejahteraan ekonomi yang ditingkatkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang stabil, dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini dapat berkontribusi pada penjagaan dan perkembangan yang lebih baik untuk keturunan, memastikan mereka mendapatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kemudian jika

program ini dapat menciptakan peluang pekerjaan atau usaha yang berkelanjutan, hal ini dapat menjadi faktor penting dalam memberikan keamanan ekonomi bagi keluarga, yang merupakan aspek penting dalam penjagaan terhadap keturunan. Dengan demikian, program kartu prakerja dapat dianggap sebagai suatu inisiatif yang berpotensi mendukung pemenuhan tujuan utama Annasb dengan menciptakan kondisi ekonomi yang memadai untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan keturunan di Kabupaten Gayo Lues.

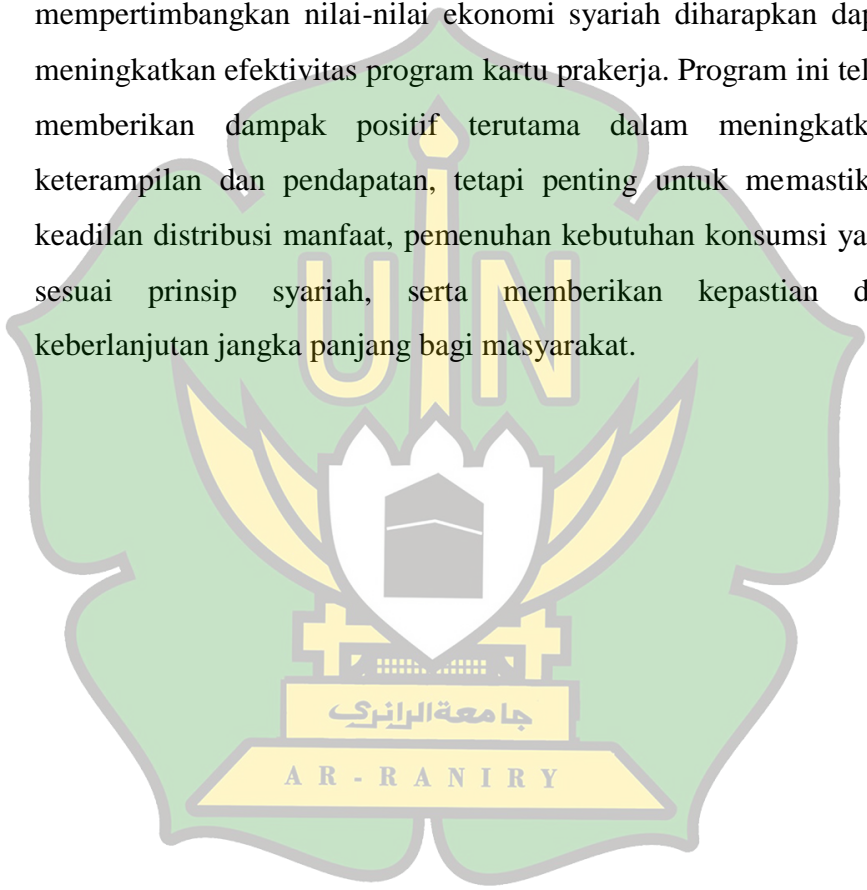
Tujuan dasar yang terakhir adalah menjaga harta (*Al-maal*) Adanya program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues berpotensi memberikan dampak terhadap pemenuhan tujuan syariah yang kelima, yaitu *Al-maal*. Program ini dapat menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap harta benda masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan dan insentif yang diberikan, program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Gayo Lues untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang dapat memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya finansial. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam pengelolaan harta mereka, termasuk dalam hal investasi dan pengeluaran.

Pemberian insentif sebagai tambahan modal usaha juga dapat dianggap sebagai langkah konkrit untuk memberikan dukungan finansial kepada peserta program. Dengan demikian, program ini dapat membantu melindungi harta benda masyarakat dari potensi risiko ekonomi, seperti kerugian usaha atau ketidakstabilan keuangan pribadi. Hal ini mencerminkan pemenuhan maqashid syariah Al-maal yang menekankan perlunya melindungi dan mengelola harta benda dengan bijak.

Selain itu, jika program ini mampu menciptakan peluang pekerjaan atau usaha yang berkelanjutan, hal ini dapat menjadi faktor penting dalam memberikan keamanan ekonomi bagi masyarakat. Dengan memberikan sumber daya ekonomi yang lebih stabil, program ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap penjagaan terhadap harta benda masyarakat. Dengan demikian, program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues dapat dianggap sebagai inisiatif yang berpotensi mendukung pemenuhan tujuan utama Al-maal dengan memberikan pelatihan, insentif, dan peluang ekonomi yang dapat mengelola dan melindungi harta benda masyarakat secara lebih efektif. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga yang menyatakan adanya jaminan sosial berupa kartu prakerja dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues apabila ditinjau dari perspektif ekonomi syariah maka menunjukkan dampak positif yang kuat terhadap

kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap terpenuhinya lima tujuan dasar seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Meskipun terdapat keluhan terkait besaran insentif dan frekuensi program, evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan nilai-nilai ekonomi syariah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program kartu prakerja. Program ini telah memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan keterampilan dan pendapatan, tetapi penting untuk memastikan keadilan distribusi manfaat, pemenuhan kebutuhan konsumsi yang sesuai prinsip syariah, serta memberikan kepastian dan keberlanjutan jangka panjang bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Meskipun terdapat beberapa dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat dan kesuksesan individu dalam mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki.
2. Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Meskipun terdapat beberapa dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat dan kesuksesan individu dalam mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki.
3. Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues memberikan dampak positif terhadap pemenuhan prinsip ekonomi syariah. Meskipun berhasil memperkuat aspek

hifdzuddin melalui pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan dan insentif, serta memotivasi penerima untuk belajar dan bekerja, program ini menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan variasi tingkat keseriusan peserta. Dari perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan program kartu prakerja juga telah memenuhi lima pemenuhan dasar yang menjadi pengukur kesejahteraan dalam islam, yaitu seperti an-nafs dengan meningkatkan kesejahteraan individu, al-aql dengan meningkatkan kapasitas intelektual, an-nasb dengan menciptakan peluang bagi perkembangan keturunan, dan al-maal dengan memberikan perlindungan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap harta benda. Meski demikian, evaluasi mendalam dan perbaikan terhadap kendala diperlukan untuk memastikan program ini berkelanjutan, inklusif, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

Untuk meningkatkan efektivitas program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues, disarankan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif di tingkat desa, menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar lokal, dan mempertimbangkan optimalisasi frekuensi program. Besaran insentif juga perlu dikaji ulang sesuai kebutuhan masyarakat,

dengan memperkuat kemitraan lembaga keuangan syariah. Pemantauan dan evaluasi program perlu ditingkatkan dengan melibatkan pihak independen untuk transparansi. Selain itu, pemerintah juga dapat memberdayakan perangkat desa, fokus inklusivitas, dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Dengan langkah ini, diharapkan Program Kartu Prakerja dapat lebih merata dan memberikan dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

2. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan efektivitas program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues, disarankan masyarakat agar dapat lebih proaktif dalam mencari informasi terkait program ini. Disarankan agar masyarakat lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh perangkat desa atau pihak terkait. Selain itu, peserta dihimbau untuk memilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka agar dapat mengoptimalkan hasil pelatihan. Penting juga bagi masyarakat untuk bersikap serius dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, partisipasi aktif dan keterlibatan penuh masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program kartu prakerja di Kabupaten Gayo Lues.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah pada jumlah narasumber yang dirasa masih kurang mewakili pemenuhan data dalam penelitian. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami penelitian dan berfokus pada aspek sosialisasi, partisipasi, dan persepsi peserta terhadap insentif dan pelatihan Program Kartu Prakerja di Kabupaten Gayo Lues. Selain itu, faktor lokal dan budaya dalam implementasi di tingkat desa juga perlu dipertimbangkan dalam penelitian serupa, dan memperluas lagi sampel untuk informan sebagai penelitian dari berbagai lapisan masyarakat dapat meningkatkan representativitas penelitian. Diperlukan pula evaluasi mendalam terhadap strategi sosialisasi dan dampak partisipasi mengenai efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abizal, N., Maimun., Yuliandawati. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). *JIMEBIS*, 1(1), 55-70.
- Al-Farisi, S., Fasa, M, I. (2022). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73-84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>
- Amelia, W. (2018). *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*. UIN Alauddin Makassar.
- Amsyal, R., Fitri, C. D., & Farma, J. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pemukiman Masjid Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Ekobis Syariah*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10046>
- Balya, M, S. (2021). Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Masalah. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1), 93–100. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15479>
- Dewi, A. S., Ariani, P., & Dianah, A. (2021). Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Prestasu Belajar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh. *Ekobis syariah*, 4(1), 28.
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i1.10047>

Ekasari. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Keuangan Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.

Firnanda, A., Fitri, C., & Ardianto, F. (2021). Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 170-180.
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5243>

Fitra, Z., Hasnita, N., & Jalaluddin, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belanja Konsumen Remaja Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekobis Syariah*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i1.10005>

Hamzah, I, R., Siti Khusnia, (2021). Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(01).
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i1.3>

Hartono, B., Siregar, M., & Sriharini. (2022). Konsep Integrasi Pendidikan Islam Dan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(02).
<https://dx.doi.org/10.30868/ei.v11i02.2210>

Hasimi, D, M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(1), 81-94.
<https://dx.doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>

Herdiamy, E, N., Fitriani, R, E., & Putri, F, A. (2023). Pengaruh Program Kartu Prakerja Pasca Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Dan Manfaat Jangka Panjang Bagi Rumah

Tangga Di Kota Payakumbuh. *Journal on Education* 5, No 2, 4226–34.). <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1134>

- Hilmi, A. (2018). Konsep Hidup Sejahtera Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Hamka). UIN Syarif Hidayatullah.
- Memah, N. I., Rares, J. J., & Waleleng, G. J. (2022). Efektivitas Program Kartu Prakerja Era Pandemi Covid--19 Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 18(1), 247–254.
- Nartin., Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemic Covid-19. *Sibatik Journal*, 1(3), 163-172.). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23>
- Nugroho, M, A. (2022). Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(01), 47-55.). <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i01.115>
- Padilla, R. (2022). Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Putra, A, A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama), *Jurnal Katalog*. 6 (8) : 1-8.
- Rawie, Y., Samputra, P. L. (2020). Analisis Cost And Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia. *Journal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(2), 118–139.). <https://doi.org/10.14710/gp.5.2.2020.118-139>
- Ria, A.N. (2023). Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Ditinjau

Dengan Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

- Rosadi, N, C.(2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta.
- Sari, M, E, P. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam, *Jurnal: Trias Politika*,2(02).).
<https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464>
- Steers, R, M. 2012. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Suardi, D. (2021). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*,20(02), 68-80.).
<https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.693>
- Syam, S. (2020). Pengaruh efektivitas dan efisiensi kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(02), 128-152.
<https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8 (2), 1-16.
<https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Tamimah, N. (2021). Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer. *Jurnal Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 01(02).
- Thian, A. 2021. *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: ANDI
- Wahyudi, I. 2022. *Ekonomi Syariah*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

- Wahyuni, E, F., Hilal, S & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3476-3486. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>
- Wijayanti, Ika, R., & Humardhiana, A. 2020. Optimalisasi Program Kartu Prakerja dengan Pelatihan Branding Strategy. *Jurnal Dimasejati* Vol.2 No.1. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6645>
- Wiriana, G. I., & Kartika, I. N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2012-2018. *E-Jurnal EP Unud*, 9(5), 1051–1081.
- Wulandari, S., Hafidhah., Komat, Y. (2020). Analisis Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Periode 2015-2019. *JIMEBIS*, 1(1).
- Zainollah., Wahjudi, F. (2018). Analisis Efektivitas Kebijakan Program RASTA Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2), 163-175. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i2.1891>

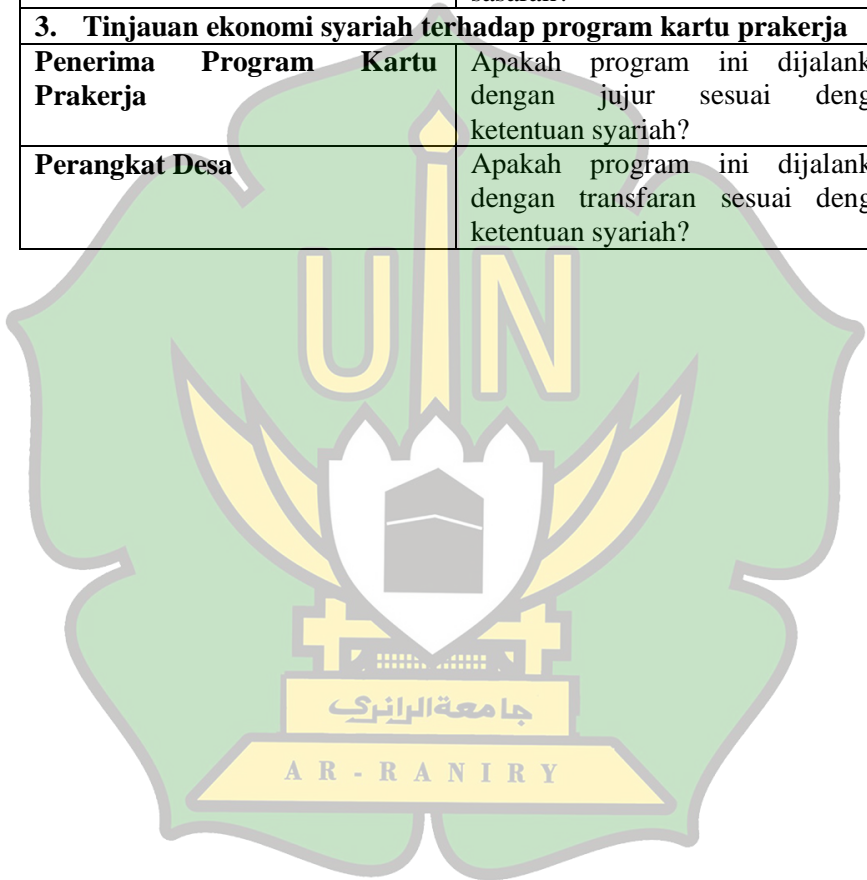
AR - RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja	
Penerima Program Kartu Prakerja	<ol style="list-style-type: none">1. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?2. Apakah tujuan utama bapak/ibu mendaftar sebagai penerima program?3. Kendala apa yang pernah dihadapi selama pelaksanaan program?4. Apakah ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait program ini?
Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana peran perangkat desa terkait pelaksanaan program?2. Apakah ada pengawasan lebih lanjut dari perangkat desa terkait keberlangsungan program?
2. Efektivitas program kartu prakerja terhadap kesejahteraan masyarakat	
Penerima Program Kartu Prakerja	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan apa yang anda pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?2. Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa (modal usaha/kebutuhan harian)?3. Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?4. Seberapa besar pengaruh program ini terhadap perkembangan usaha anda?5. Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat

	maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?
Perangkat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kartu prakerja? 2. Apakah program ini sudah tepat sasaran?
3. Tinjauan ekonomi syariah terhadap program kartu prakerja	
Penerima Program Kartu Prakerja	Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?
Perangkat Desa	Apakah program ini dijalankan dengan transparan sesuai dengan ketentuan syariah?



Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

1. Penerima Program Kartu Prakerja

<p>1. Lelawati (Penerima program kartu prakerja dari desa Kerukunan, Kuta Panjang)</p>	<p>Peneliti: Dari mana kakak mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Lelawati: Saya dapat informasinya dari media sosial, dari instagram sama google terus ada juga beberapa teman saya yang membahas program ini jadi saya tahu.</p> <p>Peneliti: Apakah tujuan utama kakak mendaftar sebagai penerima program?</p> <p>Lelawati: Katanya program ini juga ada pencairan uangnya, jadi saya daftar siapa tahu berhasil.</p> <p>Peneliti: Kendala apa yang pernah kakak hadapi selama pelaksanaan program?</p> <p>Lelawati: Mungkin saat pencairan insentif agak susah karena saya tidak punya ATM atau rekening bank, tapi akhirnya ternyata bisa dicairkan melalui akun DANA. Kemaren saya masih kurang paham masalah pencairannya tapi sekarang sudah bisa karena di bantu sama adik saya.</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi dari pemerintah terkait program ini?</p> <p>Lelawati: Tidak ada</p> <p>Peneliti: Pelatihan apa yang kakak pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?</p> <p>Lelawati: Pelatihanya memasak, kalo masalah serius atau enggaknya kan pelatihannya online jadi banyak video pelatihan yang ditonton terus durasi videonya pun panjang ada yang sampai satu jam lebih, jadi kadang saya putar videonya sambil beres-beres rumah, ada juga beberapa video lah yang saya tonton serius. Tapi kebanyakan cuma putar video setelah itu melakukan kegiatan lain. Karena kan punya anak kecil juga</p>
--	---

	<p>jadi sisah kalo fokus nonton videonya.</p> <p>Peneliti: Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa?</p> <p>Lelawati: Untuk kebutuhan harian kayak beli minyak, beras sama kebutuhan lainnya lah</p> <p>Peneliti: Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?</p> <p>Lelawati: Ada, biasanya kan pendapatan ayahnya (suami) perbulan itu sekitar lebih kurang dua jutaan lah dari gaji peragkat desa dan setelah saya lolos program ini bertambah lagi Rp. 600.000,00 setiap bulannya selama 4 bulan.</p> <p>Peneliti: Apakah kakak juga menjadikan insentif yang diberikan sebagai modal usaha?</p> <p>Lelawati: Tidak ada karena uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari</p> <p>Peneliti: Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?</p> <p>Lelawati: Tidak ada</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Lewati: Menurut saya sudah karena kan program ini langsung dari pemerintah pusat, jadi tidak ada urusan dengan pemerintah setempat. Jikapun ada ketidakjujuran ya itu pastinya dari pemerintah pusatnya yang kita tidak tahu.</p>
<p>2. Gusti Randa (Penerima program kartu prakerja dari desa Kerukunan, Kuta Panjang)</p>	<p>Peneliti: Dari mana abang mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Gusti R: Dari orang-orang banyak yang membicarakan masalah program kartu prakerja dari Jokowi.</p> <p>Peneliti: Apakah tujuan utama abang mendaftar sebagai penerima program?</p> <p>Gusti R: Awalnya sebetulnya saya daftar-daftar aja tapi ternyata diterima dan</p>

	<p>Alhamdulillah di beri dana bantuan.</p> <p>Peneliti: Kendala apa yang pernah dihadapi selama pelaksanaan program?</p> <p>Gusti R: Data saya dulu pernah saat mendaftar dinyatakan tidak sesuai dengan data di dukcapil, jadinya saya harus memperbaiki dulu secara online di dukcapil untuk didaftarkan kembali, akhirnya bisa tapi ya memakan waktu lumayan lama juga.</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait program ini?</p> <p>Gusti R: setahu saya tidak ada.</p> <p>Peneliti: Pelatihan apa yang anda pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?</p> <p>Gusti R: Pelatihan otomotif, jadi diajari gitu masalah perbengkelan lah saya ikutin pelatihan dengan serius, semua video yang di sediakan itu saya tonton karena kan saya juga punya bengkel juga jadi itung-itung untuk ilmu baru lah yang bisa diprakaktekkan di bengkel saya itu.</p> <p>Peneliti: Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa (modal usaha/kebutuhan harian)?</p> <p>Gusti R: kalau saya sebagian besarnya sebagai tambahan untuk modal usaha, untuk beli alat-alat yang kurang kan lumayan gitu untuk tambah-tambah modal lah.</p> <p>Peneliti: Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?</p> <p>Gusti R: Kalo untuk pendapatan ya jelas bertambah, bertambah Rp. 600.000 lah perbulannya sesuai yang diberikan.</p> <p>Peneliti: Seberapa besar pengaruh program ini terhadap perkembangan usaha anda?</p> <p>Gusti R: kalo pengaruh dari pelatihannya lumayan besar yak arena ternyata banyak pengetahuan baru yang selama</p>
--	---

	<p>ini saya belum tahu dan dari pelatihan ini saya jadi tahu mengenai cara-cara memperbaiki mesin misalnya. Terus banyak juga pengetahuan lain yang saya dapat dari pelatihannya ya pokoknya pelatihannya ini bermanfaat untuk usaha saya ini. Kalo dana sendiri ya lumayan sebean juga walaupun bisa dibilang tidak seberapa juga dibanding harga apa-apa yang mahal sekarang, tapi mendinglah dari pada tidak ada sama sekali. Terbilang juga kan itu uang Cuma-Cuma ya gak harus kerja tapi dapat uang segitu ya Alhamdulillah dapat pelatihannya lagi kan.</p> <p>Peneliti: Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?</p> <p>Gusti R: Setau saya tidak ada</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Gusti R: Jujur tidaknya tergantung penerimanya ya. Saya tau juga program ini dari yang saya baca kan lebih berfokus sama pelatihan tapi banyak juga saya lihat orang-orang kaya teman-teman saya yang udah dapat program tapi pelatihannya videonya itu diputar trus ditinggal gitu aja. Kalo menurut saya kan itu bukan kejujuran juga ya namanya, tapi balik lagi itu berdasarkan pendapat masing-masing orang juga.</p>
<p>2. Sumiati (Penerima program kartu prakerja dari desa Penampaan Uken, Blangkejeren)</p>	<p>Peneliti: Dari mana kakak mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Sumiati: Dapat informasinya kemaren itu dari masjid ada di umumin kalo ada program dari pemerintah yang dananya lumayan lah, dari situ coba cari tau lagi lihat-lihat di google tentang program itu.</p>

	<p>Peneliti: Apakah tujuan utama kakak mendaftar sebagai penerima program?</p> <p>Sumiati: Biar uangnya cair</p> <p>Peneliti: Kendala apa yang pernah dihadapi selama pelaksanaan program?</p> <p>Sumiati: Tidak ada</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait program ini?</p> <p>Sumiati: Cuma yang diumumkan di masjid waktu itu kalau ada program dari pemerintah, selain itu tidak ada .</p> <p>Peneliti: Pelatihan apa yang anda pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?</p> <p>Sumiati: Membuat kue, pelatihannya serius dijalankan karena memang ambil pelatihannya sesuai sama hobi kakak buat kue, jadi lihat lah tutorial-tutorial buat kue disitu. Tahapnya biar gak bantet terus ada juga tutorial buat brownis. Itu nontonnya kadang sambil di praktekan. Jadi sambil nonton sambil buat kue gitu lah abis itu catat juga resep sama cara-caranya.</p> <p>Peneliti: Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa (modal usaha/kebutuhan harian)?</p> <p>Sumiati: Nah pas keluar uangnya itu ada beberapa kali kakak beli bahan-bahan untuk buat kue brownis sama sarang semut. Mau coba-coba lah akhirnya baru percobaan pertamanya langsung berhasil. Habis itu kan buat lagi terus mulai kepikiran juga buat di jual. Dijualnya bukan per Loyang tapi di potong-potong abis itu dititip di tempat orang jualan kue basah awalnya. Sampe akhirnya kakak juga mulai buat brownis sama kue-kue lain kaya kue basah gitu kakak jual di depan rumah karena kan kebetulan juga ni rumah kakak di tepi jalan jadi mudah laku lah.</p>
--	---

	<p>Peneliti: Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?</p> <p>Sumiati: Ada, kan uang kita juga bertambah karena cair tadi Rp. 600.000 per bulan terus ada juga tambahan uang evaluasi kalo gak salah adalah cair Rp. 150.000. Terus kan pas program ini masih jalan kakak udah mulai jualan kue di depan rumah itu keuntungannya juga lumayan per harinya.</p> <p>Peneliti: Seberapa besar pengaruh program ini terhadap perkembangan usaha anda?</p> <p>Sumiati: Sangat berpengaruh, karena kemarin kakak belum ada usaha, sebetulnya buat kue sudah bisa, cuma ya belum banyak macamnya, dari pelatihan ini kakak banyak belajar buat banyak jenis kue terus pelatihannya juga mudah di pahami jadinya kakak mulai berani ni buka usaha kecil-kecilan di depan rumah karena awalnya kan di titip dulu dan ternyata laris lah makanya mulai berani buka usaha sendiri walaupun masih kecil.</p> <p>Peneliti: Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?</p> <p>Sumiati: Sampai sekarang belum ada.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Sumiati: ya sudah jujur kerena kan pemilihan penerima programnya juga langsung di pusat ya walaupun berdasarkan keberuntungan juga, tapi lebih jujur dibandingkan kalau dipilih sama keucik misal kan bisa jadi yang dipilih Cuma kerabat atau orang terdekatnya dan besar juga kemungkinan kalau uangnya nanti cair di pusat berapa yang diterima sama</p>
--	---

	<p>masyarakat juga Cuma berapa. Kalau program ini kan langsung antara pemerintah pusat sama penerima gak ada pihak lai lagi.</p>
<p>3. Khairul Abdi (Penerima program kartu prakerja dari desa Raklung, Blangkejeren)</p>	<p>Peneliti: Dari mana abang mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Kahirul: Dari media sosial, dari mulut ke mulut ada juga dari obrolan orang gitu</p> <p>Peneliti: Apakah tujuan utama abang mendaftar sebagai penerima program?</p> <p>Khairul: untuk dapat sertifikat sebetulnya karena bisa untuk tambahan CV daftar kerja.</p> <p>Peneliti: Kendala apa yang pernah dihadapi selama pelaksanaan program?</p> <p>Khairul: Tidak ada</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait program ini?</p> <p>Khairul: Dari perangkat desa ada mengumumkan di masjid.</p> <p>Peneliti: Pelatihan apa yang anda pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?</p> <p>Khairul: Penggunaan aplikasi Komputer, diajarin penguasaan Microsoft office. Pelatihannya juga diikuti dengan serius, ada juga beberapa video yang cuma diputar tapi tidak diperhatikan dengan fokus, tapi kebanyakan video ditonton dengan serius.</p> <p>Peneliti: Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa (modal usaha/kebutuhan harian)?</p> <p>Khairul: Saya ada usaha dagang kaki lima juga jadi sebagian besar uangnya saya jadikan sebagai tambahan modal usaha saya.</p> <p>Peneliti: Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?</p> <p>Khairul: Pendapatannya bertambah karena kan modalnya bertambah juga jadi</p>

	<p>sebetulnya uang yang dikasih itu tidak saya ambil pas cair, jadi saya kumpulin dulu selama 4 bulan sudah terkumpul ni Rp. 2.400.000 baru saya ambil saya tambahkan ke modal usaha dan barang yang saya jual juga bertambah.</p> <p>Peneliti: Seberapa besar pengaruh program ini terhadap perkembangan usaha anda?</p> <p>Khairul: seperti yang saya bilang tadi uangnya dijadikan tambahan modal usaha tapi ya usahanya gak sesuai juga sama pelatihan yang diambil.</p> <p>Peneliti: Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?</p> <p>Khairul: Setahu saya tidak ada.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Khairul: Iya sudah dijalankan dengan jujur.</p>
<p>4. Neli (Penerima program kartu prakerja dari desa Uring, Pining)</p>	<p>Peneliti: Dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Neli : Dari kawan</p> <p>Peneliti: Apakah tujuan utama ibu mendaftar sebagai penerima program?</p> <p>Neli : Katanya kalo daftar program ini dapat bantuan begitu</p> <p>Peneliti: Kendala apa yang pernah dihadapi selama pelaksanaan program?</p> <p>Neli R A: Saya tidak paham cara daftarnya HP juga tidak mendukung dan jaringan di tempat saya ini kan tidak ada juga, ada tapi harus jalan jauh lagi gitu. Makanya saya suruh orang buat daftarin saya.</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait program ini?</p> <p>Neli : Gak ada</p> <p>Peneliti: Pelatihan apa yang anda pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?</p> <p>Neli : saya kurang paham juga kerena yang ikut</p>

	<p>pelatihan kan kawan saya. Saya cuma terima jadi lah istilahnya.</p> <p>Peneliti: Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa (modal usaha/kebutuhan harian)?</p> <p>Neli : Kebutuhan sehari-hari, ada juga yang saya belikan sebagai pupuk untuk sawah saya.</p> <p>Peneliti: Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?</p> <p>Neli : Ada, uang saya kan jadinya bertambah gitu.</p> <p>Peneliti: Seberapa besar pengaruh program ini terhadap perkembangan usaha anda?</p> <p>Neli : Tidak ada, palingan ya berpengaruhnya seperti tadi dari uang itu saya bisa beli pupuk untuk sawah saya, jadinya sawah saya tambah subur begitu.</p> <p>Peneliti: Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?</p> <p>Neli : Tidak ada</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Neli : Tidak jujur jugak karena bukan saya yang ikut pelatihan. Kawan saya yang ikut uangnya setelah cair bagi dua. Tapi mau gimana lagi kan gak ada pilihan lain juga. Tapi di tempat saya ini rata-rata ya gitu orang yang daftarin kita Cuma terima uang aja.</p>
<p>5. Mutiara Sari (Penerima program kartu prakerja dari desa Pintu Rime, Pining)</p>	<p>Peneliti: Dari mana kakak mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Mutiara : Dari media sosial</p> <p>Peneliti: Apakah tujuan utama ibu mendaftar sebagai penerima program?</p> <p>Mutiara: Yang pastinya karena dapat insentif sama katanya ada pelatihan juga.</p> <p>Peneliti: Kendala apa yang pernah dihadapi</p>

	<p>selama pelaksanaan program?</p> <p>Mutiara: lebih ke jaringan ya, karena di tempat saya ini kan jaringan kurang bagus, jadi pas pendaftaran saya harus ke tempat yang ada jaringan dulu untuk daftar sama ngerjain pelatihan juga gitu. Pelatihannya kan lama jadi saya kadang harus ngingap di tempat orang tua saya biar bisa ikuti pelatihannya.</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait program ini?</p> <p>Mutiara: Sepertinya tidak ada.</p> <p>Peneliti: Pelatihan apa yang anda pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?</p> <p>Mutiara: Kecantikan, karena kan kebetulan juga saya suka make-up makanya sekalian saya ambil kecantikan siapa tau nanti bisa buka salon kan jadi saya lumayan serius lah ikutin pelatihannya nontonin video dari awal sampai akhir.</p> <p>Peneliti: Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa (modal usaha/kebutuhan harian)?</p> <p>Mutiara: sesuai sama pelatihannya saya beli untuk kebutuhan make-up sama ada beberapa juga untuk kebutuhan harian.</p> <p>Peneliti: Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?</p> <p>Mutiara: kalau pendapatan tetap ya segitu aja.</p> <p>Peneliti: Seberapa besar pengaruh program ini terhadap perkembangan usaha anda?</p> <p>Mutiara: Kebetulan juga saya kerja di salon punya orang jadi yang saya lihat di pelatihan itu bisa lah saya praktek kan kepada klien dan hasilnya juga lumayan memuaskan. Semoga saja setelah ini kan keahlian saya lebih meningkatlah dari sebelumnya semoga saja saya bisa mendirikan salon make-up sendiri.</p>
--	---

	<p>Peneliti: Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?</p> <p>Mutiara: Tidak ada karena kan katanya ini langsung dari pemerintah pusat jadi kalau mau ninjaukan juga lumayan susah lah.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Mutiara: Jujur lah karena kita juga gak bisa palsuin data karena datanya sesuai sama yang tercatat di dukcapil jadi kalo misal kita PNS ya otomatis tidak lulus gelombang.</p>
<p>6. Suarni (Penerima program kartu prakerja dari Siongal-Ongal, Putri Betung)</p>	<p>Peneliti: Dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Suarni: Dikasih tahu sama tetangga</p> <p>Peneliti: Apakah tujuan utama ibu mendaftar sebagai penerima program?</p> <p>Suarni: Coba-coba aja dulu siapa tau berhasil dapat bantuan pemerintah</p> <p>Peneliti: Kendala apa yang pernah dihadapi selama pelaksanaan program?</p> <p>Suarni: Saya tidak punya HP tidak paham juga cara daftarnya</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait program ini?</p> <p>Suarni: kemaren ada perangkat desa kampung ini pas ngumpul sama bapak bilang kalau ada program prakerja daftarnya online yang tidak paham caranya bisa datang ke kantor keuchik nanti akan dibantu disana.</p> <p>Peneliti: Pelatihan apa yang anda pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?</p> <p>Suarni: Di kantor keuchik kemaren saya suruh pilih yang memasak, pelatihannya itu akan saya yang urus, uangnya juga dia yang urus-urus lah biar cair.</p>

	<p>Peneliti: Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa (modal usaha/kebutuhan harian)?</p> <p>Suarni: Kebutuhan sehari-hari, untuk jajan anak juga.</p> <p>Peneliti: Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?</p> <p>Suarni: ya itu tadi kan dapat uang Rp. 600.000 per bulannya selama 4 bulan lah.</p> <p>Peneliti: Seberapa besar pengaruh program ini terhadap perkembangan usaha anda?</p> <p>Suarni: Tidak ada.</p> <p>Peneliti: Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?</p> <p>Suarni: Tidak ada</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Suarni: Sudah jujur, karena kan tidak ada kecurangan juga, dana nya juga katanya langsung dari pusat di kirim ke kita. Tidak ada juga diminta biaya apa-apa padahal kan sudah dibantu ya pas daftarnya itupun daftarnya ada dua kali foto wajah lah baru berhasil. Jadi gak langsung berhasil juga.</p>
<p>7. Ali (Penerima program kartu prakerja dari desa Gumpang Pekan, Putri Betung)</p>	<p>Peneliti: Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Ali : Dari media sosial</p> <p>Peneliti: Apakah tujuan utama bapak/ibu mendaftar sebagai penerima program?</p> <p>Ali : Untuk dapat insentif iya, untuk dapat sertifikat sama pelatihan iya juga.</p> <p>Peneliti: Kendala apa yang pernah dihadapi selama pelaksanaan program?</p> <p>Ali : Tidak ada kendala.</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait program ini?</p>

	<p>Ali : tidak ada juga.</p> <p>Peneliti: Pelatihan apa yang anda pilih pada program ini dan apakah anda mengikuti pelatihan dengan serius?</p> <p>Ali : Potografer, dan saya juga mengikuti pelatihan dengan serius</p> <p>Peneliti: Insentif yang diberikan pada program ini digunakan sebagai apa (modal usaha/kebutuhan harian)?</p> <p>Ali: Sebagai kebutuhan harian, ada beberapa juga yang belikan untuk lensa kamera sama tripod juga.</p> <p>Peneliti: Apakah ada perubahan pada pendapatan sebelum dan sesudah menerima program ini?</p> <p>Ali: Pendapatan bertambah karena ada insentifnya kan.</p> <p>Peneliti: Seberapa besar pengaruh program ini terhadap perkembangan usaha anda?</p> <p>Ali: Lumayan berpengaruh karena saya ambil pelatihannya berdasarkan dengan hobi dan pekerjaan jadi hasil fotonya lebih memuaskan dari sebelumnya lah karena sudah belajar teknik fotografer lebih banyak lagi.</p> <p>Peneliti: Apakah ada tinjauan lebih lanjut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat setelah program ini selesai?</p> <p>Ali: Tidak ada.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Ali: Iya, sudah sesuai dengan ketentuan syariah.</p>
--	---

4. Perangkat Desa

1. Mahdi (Perangkat desa)	<p>Peneliti: Bagaimana peran perangkat desa terkait pelaksanaan program?</p> <p>Mahdi: Dari kami sendiri belum ada mendapatkan himbauan dari</p>
------------------------------	--

<p>pining)</p>	<p>pemerintah pusat agar andil dalam program ini.</p> <p>Peneliti: Apakah ada pengawasan lebih lanjut dari perangkat desa terkait keberlangsungan program?</p> <p>Mahdi: pengawasan tidak ada, tapi kalau ada masyarakat yang mungkin tidak mengerti atau awam lah masalah program ini kami bersedia membantu sebisa kami, terlebih lagi di desa ini juga kan susah lah jaringan internetnya jadi nanti kami bisa bantu entah itu kita pakai Wifi kantor atau cari jalan keluar lain. Intinya akan dibantu sebisa kita lah.</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Mahdi: kalo langsung mengatasnamakan perangkat desa tidak ada, paling ya nanti kalau jumpa orang-orang kadang kita kasih tau secara personal aja.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini sudah tepat sasaran?</p> <p>Mahdi: tepat atau tidaknya kami sendiripun tidak bisa menilai karena penentuan kelulusan diseleksi oleh pemerintah pusat, kadang ada yang lolos kadang enggak.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan transparan sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Mahdi: Kalau yang saya lihat sendiri say abaca-baca di websitenya sudah cukup transparan, di cantumkan berapa dana anggarannya, berapa penerimanya tetapi dibalik itu semua kita juga tidak paham ya yang kita tau sebatas data yang dipublish saja. Tapi menurut saya itu sudah termasuk transparan.</p>
<p>2.Ramdani</p>	<p>Peneliti: Bagaimana peran perangkat desa terkait</p>

<p>(Sekretaris desa Penampaan Uken)</p>	<p>pelaksanaan program?</p> <p>Ramdani: kita sudah mengadakan pemberitahuan di masjid terkait adanya program ini, tujuannya agar masyarakat tau dan jika ada yang tertarik bisa segera mendaftar.</p> <p>Peneliti: Apakah ada pengawasan lebih lanjut dari perangkat desa terkait keberlangsungan program?</p> <p>Ramdani: pengawasan tidak ada, tapi misal ada warga yang terkendala terkait program kita sebagai perangkat bersedia lah membantumendaftarkan dan juga melakukan tahap lainnya kecuali pelatihan, karena pelatihannya program ini memang harus langsung dilakukan penerima program biar sesuai sama tujuan diciptakannya program ini.</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Ramdani: Sosialisasi terkait berjalannya program tidak ada karena memang tidak ada diperintahkan dari pusat kepada pemerintah desa ya, kalau ke pemerintah kecamatan kami kurang tahu juga. Kalau konfirmasi masalah sosialisasi kepada kami memang tidak ada.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini sudah tepat sasaran?</p> <p>Ramdani: Dari yang saya lihat ini sudah cukup tepat sasaran karena langsung di seleksi dari pusat jadi tidak ada kecurangan juga data-datanya juga langsung dari data yang tercatat dari dukcapil jadi misal dari pemerintah setempat mau memasukkan orang lain agar lewat itu tidak bisa karena segala sesuatunya langsung dari pusat sesuai dengan data asli penerima.</p>
---	---

	<p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan transparan sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Ramdani: Dari data-data yang kita lihat ini sudah cukup transparan</p>
<p>3. Jaini Marten (Perangkat desa Kerukunan kuta panjang)</p>	<p>Peneliti: Bagaimana peran perangkat desa terkait pelaksanaan program?</p> <p>Jaini M: Peran sendiri lebih ke pemerintah pusat. Karena program ini juga berbeda dengan program bansos yang kita turut andil kalau ini tidak, programnya juga serba online.</p> <p>Peneliti: Apakah ada pengawasan lebih lanjut dari perangkat desa terkait keberlangsungan program?</p> <p>Jaini M: tidak ada pengawasan juga, yang mau daftar ya daftar mandiri dengan HP sendiri. Kalau misal tidak memungkinkan bisa minta bantuan kepada siapa saja.</p> <p>Peneliti: Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kartu prakerja?</p> <p>Jaini M: Sosialisasi juga tidak ada kalau dari kita.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini sudah tepat sasaran?</p> <p>Jaini M: Masalah tepat sasaran atau tidak kita tidak bisa evaluasi karena yang menyeleksi kelulusan kan pemerintah pusat.</p> <p>Peneliti: Apakah program ini dijalankan dengan transparan sesuai dengan ketentuan syariah?</p> <p>Jaini M: Mungkin transparansinya sudah ada di website khususnya. Disana kita melihat sudah cukup transparanlah masalah anggarannya. Kalau untuk program bantuan itu menurut saya sudah bisa dikategorikan transparan.</p>



Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian







Lampiran 4 Biodata Penulis

RIWAYAT HIDUP

Nama : Julesti
NIM : 190602135
Tempat, tanggal lahir : Bener Baru, 21 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
Alamat : Desa Penampaan Uken, Kec.
Blangkejeren, Kab. Gayo Lues
Email : 190602135@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

2. SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren
3. SMP Negeri 2 Blangkejeren
4. SMK Negeri 2 Blangkejeren
5. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 9 Februari 2023

Penulis,

AR - RANIRY

Julesti